BerAKHLAK

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH



2025

PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Awal Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2023-2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja disusun dalam rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak lanjut Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Kerja ini, saya sangat berharap semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai acuan dan panduan bagi seluruh aparatur lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Mamuju, 13 Mei 2024

Sekretaris Daerah,

Dr. Muhammad Idris, M.Si
Pangkat : Pembina Utama
NIP. : 19641115 199303 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 66

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah 70

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 83

2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 124

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 125

3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah 125

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 129

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025 129

BAB V. PENUTUP 130

5.1 Kaidah Pelaksanaan 130

5.2 Penutup 130

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Belanja Daerah di Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	6
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	7
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	68
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	84
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel T-C33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Barat

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap kepala satuan perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana kerja satuan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun Rencana Strategi Sekretraiat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun anggaran diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah perlu diawali dengan menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengingat bahwa :

a. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA-OPD hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
b. Rencana Kerja OPD memuat kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat.
c. Rancangan Renja OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antara pemangku kepentingan dalam rangka menentukan prioritas sub kegiatan yang mengarah terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat dan wilayah.
d. Rancangan Renja OPD akan digunakan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD, karena Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar rancangan RENJA-OPD dan antar RKPD Kabupaten/Kota.
e. Rancangan Renja OPD walaupun penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RKPD namun tetap bahwa RENJA-OPD sebagai bahan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD.

Selain itu RENJA-OPD juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan

dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan. Kejelasan dan logisnya kegiatan yang sesuai dengan TUPOKSI disertai alokasi biayanya yang tepat dan terarah dengan memperhatikan pelayanan publik, harus tertuang dalam RENJA–OPD, karena RENJA-OPD dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
m. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025;
n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
o. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 adalah untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 kedalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh lagi penyusunan renja sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan dilaksanakan, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 adalah :

a. Menyediakan acuan/pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan RPD Provinsi Sulawesi Barat;
b. Menyediakan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
c. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
d. Memberikan pedoman Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
e. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 adalah Sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan (2) Dasar Hukum (3) Maksud dan Tujuan (4) Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, memuat uraian kinerja pelayanan OPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi OPD, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, menguaraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.

BAB III Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja OPD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang Program kegiatan dan sub kegiatan memuat penjelasan mengenai faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan, tabel rencana program kegiatan dan sub kegiatan (perumusan program kegiatan dan sub kegiatan).

BAB V Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibagi menjadi 3 (tiga) Asisten yang menaungi 6 (enam) biro yaitu 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang mengkoordinasikan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Biro Hukum; 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan 3) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan Biro Organisasi dan Biro Umum.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dilakukan dengan melihat capaian program dan kegiatan serta realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Ringkasan jumlah anggaran belanja di sekretariat daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Belanja Daerah di Sekretariat Daerah
Triwulan IV Tahun Anggaran 2023

No	Biro	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Biro Tata Pemerintahan dan Kesra	17,151,449,547	15,709,466,607	1,441,982,940	91.59
2	Biro Hukum	1,716,624,181	1,706,224,351	10,399,830	99.39
3	Biro Perekonomian dan Adm. Pembangunan	1,521,546,596	1,500,954,717	20,591,879	98.65
4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2,412,305,282	2,354,568,207	57,737,075	97.61
5	Biro Organisasi	2,055,347,908	2,038,112,422	17,235,486	99,16
6	Biro Umum	100,114,102,527	99,364,866,935	749,235,592	99,31

Dari enam biro tersebut jika diakumulasi maka besaran pagu anggaran Sekretariat Daerah adalah 124,971,376,041.00 dengan realisasi sebesar 122,674,193,239.00 dan menyisakan anggaran 2,297,182,802.00 sehingga persentase capaian kinerja anggaran sebesar 98,16 %. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 berjumlah 8 Program dan 30 Kegiatan. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 masing-masing biro dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 2) :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah s.d Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Barat

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Nama OPD : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Kondisi Perubahan Hasil Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kinerja Keluaran Kegiatan s/d akhir tahun 2022 (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program dan kegiatan (Kondisi Perubahan Hasil Daerah) tahun 2024 (n+1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
									Target Kinerja Perubahan Hasil Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Kinerja Perubahan Hasil Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Kinerja Perubahan Hasil Daerah tahun 2025 (n+2)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	1				Urusan Pendukung									
	1	01			Bidang Urusan Pemerintahan									
	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	75,59	0,00	78,00	78,00	100,00	77,60	142,60	1,89

		1	0 1	0 1	05		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100,00	0,00	N/A	N/A	#VALUE!	100,00	#VALUE!	#VALUE!
		1	0 1	0 1	02		Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	70,00	0,00	32,00	32,00	100,00	40,00	112,00	1,60
		1	0 1	0 1	03		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	98,00	0,00	97,00	97,00	100,00	98,33	195,33	1,97
						Perencanaan, Pengunggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	33,00	0,00	32,40	32,40	100,00	33,00	65,40	1,97
		1	0 1	0 2			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17,50	0,00	15,50	15,50	100,00	17,50	32,50	1,87
		1	0 1	0 2	03		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10,00	0,00	9,20	9,20	100,00	9,50	18,70	1,87
		1	0 1	0 2	02		Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4,50	0,00	2,50	2,50	100,00	4,00	11,50	1,92
		1	0 1	0 2	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3	3	3	100	2	6,00	400,00

						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA/SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	9	1	1	100	1	11,00	1100,00
		1	0 1	0 5		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	9	1	1	100	1	11,00	1100,00
		1	0 1	0 5	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	15	1	1	100	1	17,00	1700,00
		1	0 1	0 5	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10	1	1	100	1	12,00	1200,00
		1	0 1	0 5	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	1	1	1	100,00	2	4,00	200,00
		1	0 1	0 5		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1	1	1	100,00	4	8,00	150,00
		1	0 1	0 5	01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**				**#DIV/0!**	**100**	**100,00**	**100,00**

		1	01	01	02		**Tingkat Kesesuaian Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**				**#DIV/0!**	**100**	**100,00**	**100,00**
		1	01	01	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	01	01		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	01	01	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	0	1	0	0	1	1,00	100,00
		1	01	01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	3,00	300,00
		1	01	01		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	2	1	1	100	3	8,00	266,67

							Sekretariat/Tata usahaan/Sekretariat SKPD									
		1	01	03		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0	0	4/SRV/07	1	1,00	100,00
		1	**01**	**03**	**03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**				**4/SRV/07**	**4**	**4,00**	**4,00**
		1	01	03	02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	4/SRV/07	1	1,00	100,00
		1	01	03	03	Koordinasi dan Pemlihan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pemlihan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	4/SRV/07	1	1,00	100,00
		1	01	03		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	4/SRV/07	1	1,00	100,00
		1	01	03	05	Pemanfaatkan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Pemanfaatkan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	4/SRV/07	1	1,00	100,00

		1	01	03	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100				#DIV/0!	89	89,00	89,00
		1	01	03	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	0	0	0	#DIV/0!	2	2,00	100,00
		1	01	03	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50	1	54	54	100	54	129,00	174,32
		1	01	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	01	03	05	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	01	03	02	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksanaan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	01	03		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	0	1	1	100	1	2,00	200,00
		1	01	03	01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	0	0	0	#DIV/0!	4	4,00	100,00

		1	01	01	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	35	5	5	100	5	45,00	900,00
		1	01	01	03	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**				**#DIV/0!**	**57**	**57,00**	**57,00**
		1	01	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	01	01	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	0	0	0	#DIV/0!	7	7,00	100,00
		1	01	01	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1014	2	2	100	1	1017,00	1017000,00
		1	01	01	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100	2	6,00	300,00
		1	01	01		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	01	01	02	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	40	40	40	100	1	81,00	8100,00
		1	01	01	03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76	98	2	2	100	76	176,00	231,58

		1	0 1	0 5		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 5		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	**0 1**	**0 5**	**01**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**				**#DIV/0!**	**7**	**7,00**	**7,00**
		1	0 1	0 5	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 5	03	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 5		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	1	5	166,67	1	6,00	600,00
		1	0 1	0 5	05	Pengadaan Pemanas dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemanas dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	0	0	2	#DIV/0!	1	3,00	300,00
		1	0 1	0 5	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	5	5	5	100,00	1	11,00	1100,00

		1	0 1	0 5		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	5	5	500,00	2	7,00	350,00
		1	0 1	0 5	02	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**				**#DIV/0!**	**1**	**1,00**	**1,00**
		1	0 1	0 5	03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	500,00
		1	0 1	0 5		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**				**#DIV/0!**	**28**	**28,00**	**28,00**
		1	0 1	0 5	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	16	5	5	500,00	1	16,00	1600,00
		1	0 1	0 5	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	500,00

		1	0 1	0 3	07	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	0	0	0	#DIV/0!	6	6,00	100,00
		1	0 1	0 3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	0	0	0	#DIV/0!	9	9,00	100,00
		1	0 1	0 3	03	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	2	2	2	100	5	9,00	180,00
		1	0 1	0 3		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	2	2	2	100	6	10,00	166,67
		1	**0 1**	**0 3**	**05**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**100**				**#DIV/0!**	**15**	**15,00**	**15,00**
		1	**0 1**	**0 3**	**02**	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**Tersedianya Dokumen Tugas Pemerintahan**	**5**	**38**	**2**	**2**	**100,00**	**5**	**42,00**	**1200,00**
		1	0 1	0 3	03	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3		Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2	2	1	1	100,00	2	5,00	250,00
		1	0 1	0 3	05	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2	56	1	1	100,00	2	59,00	2950,00
		1	**0 1**	**0 3**	**02**	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah**	**7**	**9**	**6**	**5**	**85,33**	**7**	**11,00**	**300,00**

		1	0 1	0 3	07	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2	7	2	2	500,00	2	11,00	550,00
		1	0 1	0 3		Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Difasilitasikan	2	0	1	0	0	2	2,00	100,00
		1	0 1	0 3	05	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3	2	3	3	100	3	8,00	266,67
		1	0 1	0 3	02	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah**	**3**	**2**	**4**	**2**	**50,000**	**3**	**7,00**	**233,33**
		1	0 1	0 3	03	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1	2	2	2	500,00	1	5,00	500,00
		1	0 1	0 3		Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1	0	1	0	0	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	05	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1	0	1	0	0	1	1,00	100,00
		1	0 1	0 3	02	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**459**	**459,00**	**459,00**
		1	0 1	0 3	03	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**453**	**453,00**	**453,00**
		1	0 1	0 3		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	500	5	913	913	100	450	1166,00	456,00
		1	0 1	0 3	05	Fasilitasi Kelembagaan Dina Spiritual	Jumlah Lembaga Dina Spiritual yang Difasilitasi	5	5	5	5	100	5	9,00	500,00

		1	01	05	02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar**	**3**	**7**	**3**	**3**	**100**	**3**	**12,00**	**433,33**
		1	01	05	07	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	7	6	1	1	100	1	8,00	800,00
		1	01	05		Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1	1	1	1	100	1	3,00	300,00
		1	01	05	01	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	0	1	1	100	1	2,00	200,00
		1	**01**	**05**	**02**	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3**	**285,00**	**285,00**
		1	01	05	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	1	1	0	0	1	2,00	200,00

		1	0 1	0 5		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	1	1	1	100	1	3,00	300,00
		1	0 1	0 5	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1	0	1	0	0	1	1,00	100,00

Nama OPD : Biro Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Hasil) Pertama Kali Diusulkan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Harga Pertama Kali Diusulkan) tahun	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renstra Perangkat Daerah tahun	Realisasi Renstra Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun	Target Kinerja Perangkat Daerah tahun

								5 Tahun 2025-2029	Realisasi Kinerja pada tahun 2025 (n-1)	2025 (n-1)	Tahun 2025 (n-1)	2026 (n+1)	Tahun 2026 (n+2)	2027 (n+3)
1							2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10=(5+7+9)	11=(1+10)
4							UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01						SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Hukum	69,50	68,30	66,45	68,25	102,71	69	197,55	267,80
								Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100,00	100	300	300,00
								Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Hukum	4,19	45	95,00	97,00	102,15	4,00	146	3533,07
								Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Hukum	100,00	98,75	100,00	85,93	85,93	100,00	280,68	280,68
4	01	01	1	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Hukum	25,50		22,00	21,60	99,09	22,50	44,50	171,71
								Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Hukum	19,50		19,00	16,25	90,05	19,50	37,75	165,56
								Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Hukum	9,50		8,50	7,75	95,68	8,50	16,25	171,05
								Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Hukum	5,00		23,00	20,75	90,83	21,50	42,25	845,00

4	0 1	0 1	1	0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100	2	6	500,00
4	0 1	0 1	1	0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	7	500,00
4	0 1	0 1	1	0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	7	500,00
4	0 1	0 1	1	0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	3	500,00
4	0 1	0 1	1	0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	7	500,00
4	0 1	0 1	1	0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	100	2	6	500,00
4	0 1	0 1	1	0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	12	500,00

4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Hukum	99,00	98,71	98,50	83,93	83,18	99,00	279,00	2,82
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Hukum	100	24,27	25	28,66	99,72	25,00	73,95	0,74
4	01	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	01	01	1	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	01	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	01	01	1	02	06	Penatausahaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1	1	100	1	3	3,00

4	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	3	3	100	3	9	7.00
4	01	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	100	1	3	7.00
4	01	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	500	100	500,00	500	7.00
4	01	01	1	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100	1	3	7.00
4	01	01	1	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	100	1	3	7.00
4	01	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	3	7.00
4	01	01	1	03	06	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	3	7.00

4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	01	01	1	05	01	Pemrakarsa Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Pemrakarsa Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	2	2	2	100	2	6	3,00
4	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60	0	0	0	0	36	36	0,60
4	01	01	1	05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	01	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	01	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	1	100	1	3	3,00
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	0	0	0	0	1	1	1,00
4	01	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	0	0	0	0	1	1	0,25
4	01	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	5	0	0	0	0	1	1	0,20

							Peraturan Perundang-Undangan									
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	01	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0	1	1	1,00
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	10	10	10	100	10	50	50,00
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100	2	6	7,00
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	0	18	18	100	5	23	7,67
4	01	01	1	06	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	50	50	50	100	75	175	2,19
4	01	01	1	06	09	Pemusnahan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemusnahan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00

4	01	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Biro Hukum	100	100	100	100	100	100	500	7,00
4	01	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Penyerangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Penyerangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	6	0	9	9	100	15	24	0,00
4	01	01	1	07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00

4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Ditn Hukum	100	100	100	100	100	100	100	100
4	01	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100	1	1	1
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Ditn Hukum	100	100	100	100	100	100	100	100
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	11	11	11	100	11	11	11
4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	11	11	100	11	11	11
4	01	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	09	010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	10	0	10	10	100	10	20	2,00

							Dipelihara/ Direhabilitasi								
4	0 1	0 1	1	0 9	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	6	6	6	100	6	38	3,00
0 4	0 1	0 5				PROGRAM CASH LESS DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100	100	100	118,5	118,5	100	318,5	3,19
0 4	0 1	0 5	1	0 1		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	100	100	100	123	123	100	323	3,23
0 4	0 1	0 5	1	0 1	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40	47	35	56	160,71	40	149	3,63
0 4	0 1	0 5	1	0 1	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	520	504	500	493	98,20	500	1497	2,88
0 4	0 1	0 5	1	0 1	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	600	709	570	673	118,07	600	1982	3,30
0 4	0 1	0 5	1	0 1	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	141	245	135	239	177,04	141	625	4,42
0 4	0 1	0 5	1	0 2		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	100	100	100	114	114	100	314	3,14
0 4	0 1	0 5	1	0 2	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	2	2	1	3	300	2	7	3,50

0 4	0 1	0 5	1	0 2	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	2	6	6	6	100	2	14	7,00

Nama OPD : Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Kondisi Penyelesaian) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Realisasi Kegiatan s/d tahun 2025(n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program dan kegiatan (Kondisi Perkembangan) Daerah tahun 2026 (n+1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Pemerintah Daerah s.d tahun berjalan	
										Target Kinerja Penyelesaian Daerah tahun 2025 (n-1)	Realisasi Kinerja Pelaksanaan Daerah tahun 2025 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun 2025)	Target Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2027 (n+2)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7:6)	9	10=(5+7+9)	11=(10:4)
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	0 1					BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
4	0 1	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	65	78,67	59,65	66,50	100	62	0	0,00

								Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
								Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	77	52	52	78	100	65	0	0,00
								Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	95	88,52	94	98,45	100	95	0	0,00
6	0 1	0 1	7	0 1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22	20,67	22	20	100	24,06	0	0,00
								Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	22	14,36	22	20	100	20,50	0	0,00
								Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	9,00	8,70	9	9,75	100	10,80	0	0,00
								Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	7,50	4,00	7	10,75	100	8,85	0	0,00

4	0 1	0 1	1	0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4	6	6	100	2	1	50,00
4	0 1	0 1	1	0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA/SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA/SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2	2	30	30	100	2	1	50,00

								Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja								
4	0 1	0 1	1	0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	0	0	0	0	0	0	0.00
4	0 1	0 1	1	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Ekonomian dan Administrasi Pembangunan	95	0	0	0	0	95	0	0.00
								Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Ekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	0	0	0	0	100	0	0.00
4	0 1	0 1	1	0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	0	0	0	0	0	0	0.00
4	0 1	0 1	1	0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0.00
4	0 1	0 1	1	0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0.00

4	0 1	0 1	1	0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 2	06	Pengolahan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	7	0	0	0	0	5	1	71,43
4	0 1	0 1	1	0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwaktu Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	0	0	0	0	100	0	0,00
4	0 1	0 1	1	0 3	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00

4	01	01	1	05	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	05	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	05	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0,00
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Data Pemberhentian dan Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	98,04	98,04
4	01	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakat Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50	0	0	0	0	47	47	100,00
4	01	01	1	05	07	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	0	0	0	0	0	0	0,00

4	01	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	0	0	0	0	0	0.00
4	01	01	1	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Pemilatan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pemilatan Kinerja Pegawai	1	0	0	0	0	0	0	0.00
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	4	4	100	4	3	75.00
4	01	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2	0	0	0	0	0	0	0.00
4	01	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	0	0	0	0	0	0	0
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	63,33	63,33
4	01	01	1	06	03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0.00
4	01	01	1	06	07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	4	1	1	100	1	0	0.00

4	0 1	0 1	1	0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	18	1	1	100	1	0	0.00
4	0 1	0 1	1	0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	20	1	1	100	1	0	0.00
4	0 1	0 1	1	0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2	100	1	1	100	1	0	0.00
4	0 1	0 1	1	0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0.00
4	0 1	0 1	1	0 6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	20	1	1	100	1	0	0.00
4	0 1	0 1	1	0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	120	120	100	25	19	76.00
4	0 1	0 1	1	0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0.00
4	0 1	0 1	1	0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0.00
4	0 1	0 1	1	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Bina Pembangunan dan Administrasi Pembangunan	100	0	0	0	0	0	0	0.00

4	01	01	1	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan	1	0	0	0	0	0	0	0.00
4	01	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	1	0	0	0	0	0	0	0.00
4	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	1	0	0	0	0	1	1	100.00
4	01	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	1	0	0	0	0	0	0	0.00
4	01	01	1	07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1	0	0	0	0	0	0	0.00
4	01	01	1	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1	0	0	0	0	0	0	0.00
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Bina Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	0	0	0	0	0	0	0.00
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	0	0	0	1	0	0.00

4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Sim Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	61	30	30,43
4	01	01	1	09	01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	25	13	13	100	12	6	50,00
4	01	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4	0	10	10	100	2	1	50,00
4	01	01	1	09	010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	15	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	09	011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	8	0	0	0	0	0	0,00

4	01	06				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90	96,88	100	100	100	100	19,17	21,30
4	01	06	1	01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	90	93,75	100	100	100	100	20,00	22,22
4	01	06	1	01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	12	12	4	4	100	5	1	20,00
4	01	06	1	01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	6	5	4	4	100	5	1	20,00
4	01	06	1	02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Pengelolaan Kebijakan SDA	100	0	100	100	100	100	12,50	12,50
4	01	06	1	02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Kwordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10	0	0	0	0	4	0	0,00
4	01	06	1	02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Kwordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	06	1	02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Kwordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	12	0	4	4	100	4	1	25,00

							Energi dan Air										
4	01	06	1	05		Penyelelaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Penyelelaan Kebijakan BUMD dan BLUD	100	100	100	100	100	100	25,00	25,00
4	01	06	1	05	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Penyelelaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Penyelelaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	34	12	12	12	100	4	1	25,00
4	01	06	1	05	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Penyelelaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Penyelelaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah	34	4	4	4	100	4	1	25,00
4	01	06	1	05	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	12	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	06	1	05	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Penyelelaan Badan Layanan Umum Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelelaan Badan Layanan Umum Daerah	12	5	1	1	100	4	1	25,00

4	01	06	1	03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	12	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	06				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	11,71	100	100	100	100	20	20,00
4	01	06	1	01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	100	62,16	100	100	100	100	20	20,00
4	01	06	1	01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	12	0	4	4	100	0	0	0,00
4	01	06	1	01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	12	6	4	4	100	5	1	20,00
4	01	06	1	01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	17	17	4	4	100	5	1	20,00
4	01	06	1	02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	100	5	100	100	100	100	20	20,00
4	01	06	1	02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disusunkan	17	0	0	0	0	0	0	0,00

4	0 1	0 6	1	0 2	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disusunkan	17	2	4	4	100	5	1	20,00
4	0 1	0 6	1	0 2	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Teknis Pembangunan Daerah	12	0	1	1	100	0	0	0,00

Nama OPD : Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Pencapaian) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja (Hasil Program dan Kegiatan) Capaian s/d Akhir tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Rencana Pencapaian) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
									Target Kinerja Program (Capaian) Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Kinerja Program (Capaian) Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Target Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6x100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4x100%)
4					UrUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	0 1				SEKRETARIAT DAERAH									
4	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	60	0	50	74,25	148,50	55	129,25	2,15

							Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							Nilai Bapor SPBE Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	70	30	50	83	182	60	171	2,44
							Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	96,37	93,32	94,4	98,56	104,40	94,50	286,38	2,97
4	0 1	0 1	1	0 1		Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22,50	0	21	26,50	126,19	22	48,50	2,16
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	22,50	0	21	24,00	114,29	22	46,00	2,04
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	9,50	0	9	11,25	125,00	9,50	20,75	2,18
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7	0	6	12,50	208,33	6,50	19,00	0,95
4	0 1	0 1	1	0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4	4	4	100	2	10	5,00
4	0 1	0 1	1	0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0,00

4	01	01	1	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0,00
4	01	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0,00
4	01	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	0	0	0	1	0	0,00
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	4	4	4	100	2	10	5,00
4	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	12	3,00
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Anggaran Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	97,00	93,32	100	96,66	96,66	96,00	286	2,97
							Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	100	100	100	300	3,00

4	01	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	1	7,00
4	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	2	2	100	2	6	7,00
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	0	0	0	0	100	100	7,00
4	01	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80	0	0	0	0	0	0	0,00
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	0	0	0	0	20	20	1,00
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	66,67	100	100,00	100,00	100	266,67	2,97

4	0 1	0 1	1	0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	50	50	50	100	50	90	5,00
4	0 1	0 1	1	0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50	50	50	50	100	50	50	5,00
4	0 1	0 1	1	0 6	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	80	40	40	80	100	40	120	3,00
4	0 1	0 1	1	0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	36	40	80	100	40	116	2,90
4	0 1	0 1	1	0 7		Pengadaan Barang MHA Daerah Pemanjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Pengadaan Barang MHA Daerah Pemanjang Urusan Pemerintah Daerah Lingkup Sitra Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	500,00	500,00	100	500	5,00
4	0 1	0 1	1	0 7	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	0	0	0	0	4	4	1,00
4	0 1	0 1	1	0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	0	0	0	0	20	20	1,00
4	0 1	0 1	1	0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	0	7	7	100	15	22	1,47
4	0 1	0 1	1	0 8		Penyediaan Jasa Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Penyediaan Jasa Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Sitra Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	500	500	100	500	5,00

4	01	01	1	08	05	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	4	4	100	4	4	1
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	100	100	100	300	3,00
4	01	01	1	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	0	0	0	0	2	2	0,67
4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	7	7	7	100	7	21,00	1,91
04	01	07				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	74,95	69,91	70,90	65,00	91,68	75,03	207,94	2,73
04	01	07	1	01		Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menyelenggarakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur	100	100	100	100	100	100	300	3,00
04	01	07	1	01	01	Penyelenggaraan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2	2	2	2	100,00	2	6	7,00

0 4	0 1	0 7	1	0 1	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	4	4	100,00	4	12	3,00
0 4	0 1	0 7	1	0 1	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	4	4	100,00	4	12	3,00
0 4	0 1	0 7	1	0 2		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Paket a Pengadaan dalam Menyelenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	0	100	500	500,00	100	200	2,00
0 4	0 1	0 7	1	0 2	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4	4	4	4	100,00	4	12,00	3,00
0 4	0 1	0 7	1	0 2	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	4	4	100,00	4	12	3,00
0 4	0 1	0 7	1	0 2	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	4	4	100,00	4	12	3,00
0 4	0 1	0 7	1	0 3		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenyelesaian Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	100	100	100	100,00	100,00	100	500,00	5,00
0 4	0 1	0 7	1	0 3	03	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	50	50	50	50	100	50	90	3,00

0 4	0 1	0 7	1	0 3	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	3	3	100	3	9	3,00
0 4	0 1	0 7	1	0 3	03	Pendampingan, Konsultasi, dan atau Sosialisasi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan atau Sosialisasi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	3	3	100	3	9	3,00

Nama OPD : Biro Organisasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perubahan Daerah) Tahun 2025-2026	Realisasi Target Kinerja dan kabupaten Kapuas n.d tahun 2025(n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Kerja Daerah tahun 2024 (n+1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
								Target Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1)	Target Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)	11=(3 /10)
4	0 1	0 1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai SAKIP Lingkup Biro Organisasi**	**89**	**88**	**83**	**80**	**96%**	**86**	**246**	**276%**

							Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup Biro Organisasi	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**200**	**200%**
							Nilai Rapor SPBE Lingkup Biro Organisasi	**75**	**27**	**55**	**94**	**171%**	**60**	**191**	**155%**
							Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro Organisasi	**97**	**97**	**97**	**99**	**102%**	**97**	**200**	**202%**
4	0 1	0 1	1	0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	29	26	25	25	96%	28	79	282%
							Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Biro Organisasi	24	19	25	23	92%	22	63	264%
							Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Biro Organisasi	15	13	14	13	84%	15	40	275%
							Nilai Evaluasi Internal Lingkup Biro Organisasi	18	6	16	21	128%	14	40	227%
4	0 1	0 1	1	0 1	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	1	1	100%	2	7	350%
4	0 1	0 1	1	0 1	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2	2	100%	2	6	300%

4	0 1	0 1	1	0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4	4	100%	4	12	300%
4	0 1	0 1	1	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Lingkup Ibu Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%
4	0 1	0 1	1	0 5	000 1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	0	0	0	-	2	2	100%
4	0 1	0 1	1	0 5	000 2	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	53	0	0	0	-	29	29	55%
4	0 1	0 1	1	0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	0	10	10	100%	12	22	183%
4	0 1	0 1	1	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Lingkup Ibu Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	10	10	100%	10	30	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10	10	10	100%	10	30	300%

4	0 1	0 1	1	0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	500	500	500	500	100%	500	900	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	80	80	80	80	100%	80	240	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60	60	60	60	100%	60	180	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70	70	70	70	100%	70	210	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10	10	10	10	100%	10	30	300%
4	0 1	0 1	1	0 6	001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1	100%
4	0 1	0 1	1	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Ben Organisasi	100	100	100	100	100%	100	300	300%

4	01	01	1	07	0003	Penyediaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	15	15	15	15	100%	15	45	300%
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Ibto Organisasi	100	100	100	500	100%	100	500	500%
4	01	01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	2	2	100%	2	6	300%
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelelaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Lingkup Ibto Organisasi	100	100	100	500	100%	100	500	500%
4	01	01	1	09	0002	Pemeliharaan Alat Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	13	13	13	100%	13	39	300%
4	01	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	0	0	0	-	5	5	100%
4	01	02				Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Minimal 31	33	33	33	33	100%	33	99	267%
							Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal 30 Poin pada	100	50	83	34	41%	100	100	168%

							Komponen Penilaian SAKIP								
4	0 1	0 2	1	0 1		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pemantauan Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan restrukturisasi perangkat Daerah dengan aturan yang ada	65	65	75	75	100%	60	220	275%
							Indeks Kematangan Organisasi	66	0	37	37	101%	37	74	162%
4	0 1	0 2	1	0 1	000 1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi (Dokumen)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
4	0 1	0 2	1	0 1	000 2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	6	6	6	100%	6	18	300%
4	0 1	0 2	1	0 1	000 3	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	3	3	3	3	100%	3	9	300%
4	0 1	0 2	1	0 2		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase OPD yang telah menyusun Peraturan Internal sesuai aturan yang ada	65	50	80	50	125%	50	130	160%
							Nilai SAKIP Pangkep	74	68	70	69	98%	70	207	279%
4	0 1	0 2	1	0 2	000 1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	8	8	8	8	100%	8	24	300%

4	0 1	0 2	1	0 2	000 2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	7	7	7	7	100%	7	21	300%
4	0 1	0 2	1	0 2	000 3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1	1	1	1	100%	1	3	300%
4	0 1	0 2	1	0 2	000 4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	30	20	20	20	100%	20	60	200%
4	0 1	0 2	1	0 2	000 5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	3	3	3	3	100%	3	9	300%

Nama OPD : Biro Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d tahun 2022(n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2024 (n+1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
					Target Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Kinja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2024 (tahun berjalan tahun (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
	1				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**									
	1	01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Point)	101,6	0	24	17,1	71,25%	24,6	41,7	41,04%
	1	01	01			Nilai Penyusunan Kinerja Lingkup SKPD (Point)	63,5	0	20	19,86	99,30%	20,5	39,56	62,30%
	1	01	01	01		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Point)	37,6	0	12	10,41	86,75%	12,3	22,71	60,40%
	1	01	01	02		Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Point)	25,7	0	8	5,25	65,63%	8,2	13,45	52,33%
	1	01	01	03		Nilai Capaian Kinerja Lingkup SKPD (Point)	56,6	0	16	11	81,25%	16,4	29,4	57,07%
	1	01	02		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	6	6	7	100,00%	7	20	71,43%
	1	01	02	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-Jlire Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-Jlire Umum	4	1	1	1	100,00%	1	3	75,00%
	1	01	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-Jlire Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Jlire Umum	4	1	1	1	100,00%	1	3	75,00%

	1	01	02	03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-Ilmo Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-Ilmo Umum	4	1	1	1	100,00%	1	3	75,00%
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-Ilmo Umum dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-Ilmo Umum	4	1	1	1	100,00%	1	3	75,00%
	1	01	03		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Ilmo Umum	8	6	2	2	100,00%	2	10	125,00%
	1	01	03	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	6	6	8	66,66%	7	21	70,00%
	1	01	03	03	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	800	0	95	500	100,00%	100	300	50,00%
						Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	400	95	90	100	100,00%	100	290	74,50%
					Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13400	500	5360	5360	97,00%	5360	7020	52,25%

								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	0	100	100	100,00%	5	105	94,50%
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penyajian/ Verifikasi Keuangan Biro Umum	9950	0	12	12	100,00%	2400	2412	24,24%
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Biro Umum	4	12	12	12	100,00%	1	25	625,00%
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Biro Umum	8	1	1	1	100,00%	2	4	50,00%
								Penjabaran dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20	0	100	100	100,00%	5	105	525,00%
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Biro Umum	69	6	16	16	100,00%	16	38	59,38%
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	400	0	100	98,96	98,96%	100	198,96	49,74%

							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Biro Umum	120	1	30	30	100,00%	30	61	50,83%
							Pengurusan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengurusan Barang Milik Daerah Biro Umum	16	0	4	4	100,00%	4	8	50,00%
							Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Biro Umum	16	0	0	0	0,00%	4	4	25,00%
							Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Biro Umum	24	0	3	3	100,00%	6	9	37,50%
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	288	0	12	12	100,00%	72	84	29,17%
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Biro Umum	8	0	12	12	100,00%	2	14	175,00%
							Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Umum	80	28	1	1	100,00%	1	30	75,00%

								Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	400	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
								Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	4	0	0	0	0,00%	1	1	25,00%
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	400	0	100	99,34	99,34%	100	199,34	49,84%
								Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	33	23	575	575	100,00%	7	603	1945,16 %
								Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40	70	1	1	100,00%	10	81	202,50%
								Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	0	1	1	100,00%	1	2	50,00%
								Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	28	0	75	72	96,00%	7	79	282,14%
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	0				10	10	25,00%

							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200	59	100	500	100,00%	50	169	84,50%
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)	400	0	100	99,76	99,76%	100	199,76	49,95%
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	0	25	25	100,00%	4	29	181,25%
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	0	20	11	55,00%	4	15	93,75%
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	36	15	15	100,00%	2	51	462,50%
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	15	15	15	100,00%	2	32	400,00%
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80	0	16	16	100,00%	12	28	56,25%
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	520	780	936	79,47%	12	920	1933,33 %
							Pemutakhiran Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Arsip Dinamis pada SKPD	4	20	1	1	100,00%	1	22	550,00%

							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	600	0	95	95	100,00%	100	100	46,75%
							Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	75	5	5	5	100,00%	5	17	72,22%
							Penyediaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26	0				5	5	59,25%
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDisediakan	46	4	2	2	100,00%	10	16	73,33%
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	240	10	50	50	100,00%	70	130	59,29%
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelelnaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	400	0	100	100	96,25%	100	200	50,00%
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	4867	100	100	100,00%	12	4977	16566,75 %
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	4	4	4	100,00%	12	20	41,67%
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	0	1	1	100,00%	1	2	50,00%

							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	400	0	100	98,49	98,49%	100	398,49	49,62%
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	80	17	28	28	100,00%	28	57	71,25%
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	460	164	150	150	100,00%	120	434	94,42%
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	630	35	70	70	100,00%	170	275	43,65%
							Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	4	12	12	100,00%	12	28	58,33%
							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persen)	400	0	100	99,15	99,15%	100	398,15	49,79%
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	2	2	2	100,00%	2	6	75,00%

							Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20	0	5	5	100,00%	6	11	45,83%
							Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	2	2	2	100,00%	2	6	75,00%
							Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyelelnaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Persen)	400	0	100	99,15	99,15%	100	199,15	49,79%
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20	0	40	40	100,00%	5	45	225,00%
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15	0	40	40	100,00%	5	45	300,00%
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	40	0	800	774	96,75%	10	784	1960,00 %
							Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyelelnaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Persen)	400	0	100	97,31	97,31%	100	197,31	49,33%
							Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	645	0	2000	1448	72,40%	200	1648	195,03%
							Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3900	1500	1200	1070	89,17%	900	1470	88,97%

							Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	6200	0	2500	2500	100,00%	1440	3460	62,90%
							Fasilitasi Kepротokolan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kepротokolan (Persen)	400	0	100	99,02	99,02%	100	0	0,00%
							Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4440	0	1000	1677	91,17%	1000	2677	58,38%
							Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40	43	100	100	100,00%	12	155	322,92%
							Pengelolaan Hubungan Kepротokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Kepротokolan	4070	0	1000	1000	100,00%	900	2700	66,34%

Mamuju, 22 Mei 2025

Sekretaris Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

Dr. Muhammad Idris, M.Si
Nip. 196403151999031001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan dan tugas fungsi Sekretariat Daerah tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun memberikan pelayanan kepada unsur pimpinan, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Pada tataran Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perencanaan lingkup Sekretariat Daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan asset lingkup Sekretariat Daerah.
3. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lingkup Sekretariat Daerah.
4. Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur lingkup Sekretariat Daerah.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Sekretariat Daerah.
6. Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai pasca bencana gempa bumi.

Selain permasalahan umum di atas, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas aparatur Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara optimal berdasarkan analisis beban kerja sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja organisasi.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan budaya kerja pada setiap unit belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.
3. Sarana dan prasarana pelayanan Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara maksimal.

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Kurangnya sinergitas dengan lembaga pemerintahan lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat dinamis mempengaruhi perubahan tata kelola pemerintahan.
3. Kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan.

a. Tantangan

Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk tantangan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Masih terdapat kompetensi sumberdaya aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku.
2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja normatif aparatur pemerintah menjadi pola pikir dan budaya kerja konstruktif yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
3. Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Peluang

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang cukup potensial;
2. Komitmen pimpinan cukup tinggi dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Bid Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	Indikator	SPM standar nasional	IKK	Target Kinerja Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Fasilitasi dan Pembinaan di Bidang Kerjasama			100	100	100	100	100	100	100	100	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Bid Hukum

NO	Indikator	SPM standar nasional	IKK	Target Kinerja Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tingkat Harmonisasi Hukum			80	70	80	90	-	-	80	90	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan

NO	Indikator	SPM/Sesuai dgn nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tun n)	Tahun 2026 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tun n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tingkat Kualitas Kebijakan			80	70	80	90	-	-	80	90	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	Indikator	SPM/Sesuai dgn nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tun n)	Tahun 2026 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tun n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tingkat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			70,90	73,05	73,05	75,95	89,91	-	73,05	75,95	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Organisasi

NO	Indikator	SPM/Sesuai dgn nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tun n)	Tahun 2026 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tun n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indeks Kelembagaan			T	II	II+	II+	-II	II	II+	II+	

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Biro Umum

NO	Indikator	SPM/Sesuai dgn nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tun n)	Tahun 2026 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tun n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indeks Kepuasan Layanan			N/A	100	100	100	100	-	100	100	

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna menwujudakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai unsur pendukung yang memilki peran penting dibawah kepemimpinan sekretaris daerah yang dilimpahkan pada biro-biro. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelenggaran pemerintahan Sekretariat Daerah antara lain sinergi penyusunan kebijakan daerah, efektifitas pelaksanaan kebijakan daerah, akuntabilitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah, dan peningkatan manajemen umum di lingkup Sekretariat Daerah. Oleh karena itu terdapat isu-isu strategis yang perlu didorong dalam kurun waktu kedepan.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dalam kurun waktu 2023 – 2026, adalah sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:

1. Belum Optimalnya Penyusunan dan Penilaian LPPD.

   Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas amanat yang diterima melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Penyususnan LPPD sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang Undang 23 tahun 2014 menjadi laporan kepada pemerintah pusat terkait pelaksanaan desentralisasi/ urusan yang telah diselenggarakan pemerintah daerah. Sehingga poin LPPD menjadi rapor yang menunjukkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

   Peran Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring penyusunan LPPD oleh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Barat untuk menyusun LPPD Provinsi Sulawesi Barat serta penyusunan LPPD oleh seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat.

   Sehingga untuk meningkatkan poin LPPD, upaya koordinasi untuk memastikan proses pembinaan, evaluasi dan monitoring bisa berjalan dengan baik hasil dimaksimalkan.

   Dalam proses ini, pemahaman aparatur baik di internal selaku pendukung dalam proses pembinaan, pembinaan dan monitoring; maupun pemahaman aparatur di masing-masing instansi yang menyusun LPPD sangat penting untuk diperhatikan . Sebab ketersediaan dan pemahaman atas data yang dibutuhkan dalam menyusun LPPD ini berpengaruh secara langsung dalam upaya peningkatan poin LPPD.

2. Belum Optimalnya Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Pembentukan daerah otonomi baru menjadi isu yang selalu muncul setiap tahunnya sebab aspirasi masyarakat terkait pembentukan daerah otonomi baru terus disuarakan. Namun upaya fasilitasi ini belum dapat dilakukan dengan maksimal sebab moratorium pemekaran daerah yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 masih belum dicabut.

Di sisi lain fasilitasi pembentukan daerah otonomi baru tetap harus dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen terkait pembentukan daerah otonomi baru yang *urgent* untuk segera ditindaklanjuti sudah siap saat moratorium dicabut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembentukan kota Mamaju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Maka upaya antisipasi atas pencabutan moratorium harus terus dilakukan dengan memastikan kelengkapan data dan ketersediaan data serta dokumen yang dibutuhkan selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menyukseskan upaya pembentukan Kota Mamuju.

3. Belum Optimalnya fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam upaya fisilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintah, koordinasi menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi. Kemampuan SDM dalam melakukan diplomasi menjadi salah satu hal yang penting untuk dimiliki. Sebab dalam upaya fasilitasi ini, benturan kepentingan seringkali tidak dapat terhindarkan sehingga upaya untuk menemukan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak harus bisa terwujud.

Upaya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melibatkan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementrian Dalam Negeri serta masing-masing kabupaten/kota serta kecamatan yang berbatasan baik dalam lingkup batas antarprovinsi maupun batas daerah di dalam wilayah Sulawesi Barat.

Kemunculan klaim atas wilayah Sulawesi Barat harus terus diantisipasi dengan kesiapan sumber daya baik sumber daya manusia maupun kelengkapan data dan dokumen yang bisa menjadi kekuatan hukum dalam mengklaim wilayah khususnya wilayah terluar Sulawesi Barat.

4. Belum optimalnya fasilitasi kerjasama daerah

Peran fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi salah satu peran penting yang banyak mendukung dalam pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi Barat. Namun peran fasilitasi ini seringkali tidak dapat berjalan dengan maksimal akibat

kurangnya perhatian instansi terkait atas kebutuhan data serta kelengkapan laporan tindak lanjut atas kerjasama yang dilakukan.

Secara hukum daya ikat untuk meminta instansi yang telah difasilitasi kerjasamanya untuk melaporkan tindaklanjut kerjasama masih lemah. Meskipun telah terbit Permendagri 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Permendagri 25 tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga Luar Negeri, namun belum ada perda yang secara khusus mengikat di lingkup Pemerintah Sulawesi Barat.

Padahal laporan atas tindak lanjut fasilitasi kerjasama ini menjadi hal yang dinilai oleh pemerintah pusat atas kinerja pemerintah daerah. Untuk itu dukungan untuk mengoptimalkan fasilitasi kerjasama daerah ini perlu untuk dikuatkan.

5. Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan.

Fasilitasi terkait bidang keagamaan ini banyak yang menjadi isu penting sebab menjadi salah satu aspek yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kegiatan Hibah Rumah Ibadah yang selalu dilakukan setiap tahun menjadi salah satu hal yang banyak dimanfaatkan oleh umat beragama yang ada di wilayah Sulawesi Barat. Bantuan rumah ibadah ini membutuhkan sumber daya yang cukup untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas rumah ibadah yang akan dan telah menerima bantuan.

Salah satu kendala yang cukup terasa di lapangan adalah keterbatasan sumber daya serta lokasi rumah ibadah yang menerima bantuan tersebut. Sejumlah rumah ibadah yang terletak di pelosok masih memiliki akses media komunikasi dan transportasi yang terbatas. Hambatan eksternal ini berbenturan langsung dengan hambatan internal terkait terbatasnya sumber daya baik transportasi maupun komunikasi yang mendukung mobilitas tim evaluasi dan monitoring di lapangan.

Pelaksanaan MTQ dan STQ pun perlu menjadi perhatian penting karena berpengaruh langsung pada pandangan publik pada Pemerintah Sulawesi Barat. Keikutsertaan pada ajang MTQ dan STQ saja tidak akan bisa menaikkan citra positif masyarakat atas kemampuan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan di bidang Keagamaan. Upaya untuk meraih posisi pemenang di kompetisi tersebut juga perlu menjadi perhatian yang berarti upaya koordinasi dan pembinaan di tingkat kabupaten dan provinsi perlu direncanakan dan dilakukan dengan baik.

6. Belum optimalnya koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar

Pemahaman atas peran pemerintah provinsi khususnya Sekretariat Daerah dalam fasilitasi kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar masih rendah. Hal ini menghambat proses koordinasi dalam upaya fasilitasi yang dilakukan.

Hal ini tercermin dalam peran pemerintah Provinsi terkait dana BOS yang belum diatur secara jelas sehingga dalam panyaluran dana BOS bisa terjadi melibatkan komunikasi langsung antara KPPN dengan pihak sekolah di kabupaten/kota tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Hal ini menjadi sangat penting untuk dibuatkannya aturan hukum yang secara jelas menetapkan SOP dan peran masing-masing instansi/perangkat daerah dalam penyaluran dan pengawasan dana BOS ini.

Di sisi lain, peran Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat terkait non pelayanan dasar di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, trasnmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan masih belum sepenuhnya dipahami oleh instansi teknis serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pelibatan secara aktif oleh instansi teknis dalam upaya perumusan kebijakan di bidang tersebut pelu dilakukan.

b. Belum Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Belum optimalnya fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota.

Pembinaan produk hukum daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan provinsi oleh Menteri Dalam Negeri dan rancangan peraturan kabupaten oleh Gubernur, hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah provinsi dalam melakukan fasilitasi peraturan perundang-undangan sangat urgen. Disatu sisi produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah provinsi difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, namun disisi yang lain pemerintah provinsi juga melakukan fasilitasi terhadap produk hukum daerah yang disususn oleh pemerintah kabupaten.

3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum yang ditujukan kepada kepala daerah,

perangkat daerah, dan lembaga pemerintahan di bawahnya yang timbul dari pihak swasta, masyarakat maupun perorangan. Kepala daerah mempunyai tugas untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan namun dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya perkara hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diperlukan pananganan dan penyelesaian secara komprehensif untuk penyelesaian sengketa di badan peradilan.

Dalam rangka penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta sebagai standarisasi metode penyelesaian permasalahan litigasi dan non litigasi, sementara itu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pemerintah Proinsi Sulawesi Barat, bahwa dalam penanganan perkara pemerintah daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

c. Belum Optimalnya Fasilitasi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD

Tujuan utama pembentukan/pendirian BUMD dan BLUD merupakan salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah di sektor bisnis. Namun kendala yang dihadapi sampai saat ini BUMD dan BLUD belum mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan APBD di Sulawesi Barat. Hal ini disebabkan karena:

Khusus untuk BUMD Perumda Sebuku Energi Malaqbi terkendala dengan belum diserahkannya dana PI (Participating Interest) oleh kontraktor pengelola migas pada blok Sebuku;

Khusus untuk BUMD Perseroda Sulawesi Barat Malaqbi, pengelolaan perseroda tersebut belum dapat memberikan hasil yang maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap Direksi pengelola Perusda;

Khusus untuk BLUD penerimaan pendapatan yang diterima pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat belum sesuai dengan yang dituangkan dalam rencana bisnis anggaran BLUD. Hal ini dikarenakan jumlah pasien yang diproyeksikan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi.

2. Belum optimalnya Pengendalian dan perumusan kebijakan perekonomian daerah terkait inflasi daerah.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia

tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (administered prices).

Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap shocks tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) mulai tahun 2008.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan dalam mengkoordinasikan sekaligus mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Selain itu, Pokjanas (kelompok kerja nasional) TPID dibangun sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian harga.

Keanggotaan TPID terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga. Koordinasi yang solid di antara berbagai penentu kebijakan publik di daerah tersebut menghasilkan kombinasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga secara keseluruhan berdampak positif bagi terjaganya harga barang pokok bagi masyarakat. Diharapkan, TPID ke depan tidak hanya menyasar persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek, namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan struktur pasar yang efisien.

3. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaku usaha dan instansi terkait kebijakan akses keuangan daerah.

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari sejauh mana kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin untuk menetapkan dan mengambil keputusan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal kebijakan ekonomi, implementasinya diwujudkan dalam pembuatan regulasi dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menggerakan perekonomian masyarakat. Memasuki era baru sistem pemerintah di Indonesia terutama sejak dilaksanakannya otonomi daerah, pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan daerah sudah lebih leluasa dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerah, khususnya dalam bidang ekonomi demi memperkuat ekonomi lokal yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan terutama bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam mengembangkan potensi usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Keterlibatan masyarakat dalam proses meningkatkan kesejahteraan, diharapkan dapat memiliki rasa tanggung jawab dan mendorong terwujudnya kesejahteraan bersama sehingga kemiskinan dapat ditekan.

Dalam menciptakan sinergitas antara pelaku usaha dan instansi terkait diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan prima bagi setiap masyarakat khususnya pelaku usaha dalam hal pembuatan perijinan usaha yang dapat diperoleh dengan cepat, murah, dan ramah serta untuk mengakses lembaga-lembaga permodalan dapat kiranya difasilitasi oleh pemerintah sehingga sektor riil akan dapat bergerak lebih nyata karena pelaku usaha memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan produktifitas dan akses informasi dapat kiranya dibangun dengan penyebaran yang merata agar supaya pelaku usaha mendapatkan informasi dengan mudah dan akurat.

4. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah. (1)

Dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran, Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) membutuhkan suatu sistem yang dapat teringtegrasi langsung kepada setiap SKPD dan Kabupaten yang ada sehingga proses pengawasan realiasasi penyerapan anggaran dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal ini menjadi bahan

pertimbangan bagi pimpinan untuk melihat perkembangan dalam penyerapan anggaran dalam pengambilan kebijakan.

TEPRA diharapkan dapat menjadi alat guna mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, TEPRA juga diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran, sehingga diharapkan dengan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, roda perekonomian dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

d. Belum Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pusat maupun daerah terus menyiapkan regulasi yang dianggap dapan mendukung percepatan proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Bukan hanya itu, pengembangan system SPSE juga terus diselaraskan.

Kendati demikian, nampaknya percepatan proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal dicapai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Lambatnya proses perencanaan, ketidak cakapan pelaku pengadaan dan faktor-faktor lain menjadi penyebab keterlambatan. Akibatnya sering ditemui masalah dalam hal realisasi dan pembayaran pekerjaan.

Hal ini menjadi sangat penting untul mendapat perhatian serius. Kolaborasi kerja antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan semua stake holders harus semakin ditingkatkan. Demikian pula denga kegiatan monitoring pimpinan yang efektif sangat dibutuhkan.

2. Belum optimalnya kapasitas SDM pengadaan barang dan jasa.

Pelaku pengadaan barang dan jasa sangat menentukan efektifitas proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Mulai dari proses perencanaan dampai dengan selesainya pekerajaan. Oleh sebab itu pengembangan kapasitas SDM perlu mendapat perhatian yang serius.

Saat ini Biro Pengadaan Barang dan jasa memiliki 24 orang dari kebutuhan 44 orang pada formasi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (kurang dari target 54.55%). Selain itu juga belum memiliki personil perencana, pengelola kontrak dan pengelola swakelola. Belum lagi kebutuhan

personil dalam bidang kelembagaan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Selain itu, kebutuhan SDM eksternal Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga perlu mendapat perhatian. Termasuk di dalamnya ketersediaan SDM pelaku pengadaan pada setiap Perangkat Daerah dan pembinaan penyedia sebagai mitra. Semua ini perlu dikolaborasikan agar efektifitas proses pengadaan barang jasa bisa dilaksanakan.

3. Belum optimalnya fungsi advokasi dan kematangan kelembagaan barang dan jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak hanya berfokus pada proses pemilihan penyedia barang jasa saja. Pada sisi lain, aspek lain seperti kelembagaan dan advokasi juga menjadi prioritas utama. Inilah ruh dari transformasi Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Pada sisi kelembagaan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dituntut untuk menjadi Lembaga dengan manajemen yang baik. Hal ini dilakukan dengan pemenuhan standarisasi dan pola kerja yang standar. Demikian pula dalam menjalankan fungsi kordinator UKPBJ kabupaten/kota di Sulawesi Barat.

Pada Aspek Advokasi, keberadaan UKPBJ dituntut untuk selalu memberi pendampingan. Penyelenggaraan kegiatan konsultasi yang berkesinambungan menjadi sangat penting. Demikian pula kegiatan upgrading pengetahuan melalui diklat, sertifikasi dan sosialisasi.

4. Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara eletronik.

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pengadaan yang sudah ada. Pengelolaan perangkat yang baik akan sangat menentukan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, LPSE memegang peranan yang sangat penting.

Pertama, pemenuhan SDM pengelolaan LPSE. Dibutuhkan ketersediaan SDM yang professional untuk menelola bagian-bagian seperti admin, pemeliharaan perangkat. Bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas.

Kedua, pemenuhan sarana-prasarana. LPSE dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pendampingan memerlukan adanya sarana yang memadai. Mulai dari backup keamanan sampai pada fasilitas administrasi.

Ketiga, adalah pengeloaan informasi yang efektif. Hal ini dapat diwujudkan bila ada kordinasi yang baik dengan pihak lain, terutama yang membidani

keuangan dan perencanaan. Selain itu keberadaan aplikasi lokal penunjang yang baik akan sangat mendukung kinerja LPSE.

e. Belum Optimalnya Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

   Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

   Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

   Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

2. Belum Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

   Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi peningkatan pelayanan publik.

   Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru

pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/ prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

4. Belum optimalnya penataan dan fasilitasi kelembagaan pemerintah daerah. (1)

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-egineering*) yang "ramping struktur, kaya fungsi". Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

f. Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan kerumahtanggan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan administrasi pimpinan serta fasilitasi perangkat daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan

Pelayanan pimpinan dan perangkat daerah antara lain untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan pelayanan kerumahtanggan di lingkup perkantoran maupun rumah jabatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi biro umum yakni kurangnya pengendalian dan keterlambatan penyediaan logistik pada rumah tangga pimpinan dan kurangnya pengendalian, pengawasan serta

pemeliharaan kendaraan dan bangunan. Hal tersebut menjadi faktor lemahnya Pelayanan Kerumahtanggaan dan pelayanan umum. Padahal Salah Satu Sentral Pelayanan Pimpinan Berada pada Biro Umum Oleh Karenanya Hal Tersebut Harus Mendapatkan Penguatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Pemahaman terkait pelaksanaan tugas pramusaji dan supir pimpinan / operasional juga masih perlu di tingkatkan mengingat hal tersebut merupakan kegiatan yang melekat dan merupakan pelayanan langsung.

2. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat.

Sistem manajemen keuangan daerah (*Financial Management System*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *Good Governance* di daerah. Bagian bagian lain yang sama pentingnya adalah ménata sistem perencanaan dan penganggaran, sistem penatausahaan, sistem akuntansi dan pelaporan. Tuntutan pembaharuan dan akuntabilitas sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan mendasarkan konsep *value for money*, sehingga tercipta akuntabilitas public (*Public accountability*).

3. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah lingkup sekretariat.

Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian

Pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah milik daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebgai sumber pembiayaan daerah. Dengan pengelolaan barang milik daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan prinsip *good governance* diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan barang milik daerah.

Sistem pengelolaan barang milik daerah tidak hanya mencakup pengelolaan barang milik daerah tetapi juga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimulai dari proses perencanaan pengadaan sebagai pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran sampai pada proses penghapusan yang dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan.

Barang milik daerah sekretariat daerah yang penatausahaannya berada pada Biro Umum mempunyai beberapa tantangan kedepannya diantaranya tingkat kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup tinggi sedangkan kebutuhan anggaran yang kurang memadai, barang milik daerah yang masih

dikuasai pihak lain atau sudah tidak diketahui keberadaannya, pencatatan dan kodefikasi barang milik daerah belum optimal serta barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah selain itu juga penggunaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang tidak optimal.

Dalam pencatatan dan kodefikas barang milik daerah juga msih perlu di optimalkan mengingat keadaan pasca bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan beberapa barang milik daerah harus dilakukan penghapusan dan pencatatan ulang.

4. Belum optimalnya pelayanan pimpinan.

Pelayanan pengelolaan administrasi pimpinan merupakan ujung tombak pelayanan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pimpinan atau pejabat pemerintah harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika pengelolaan administrasi tidak dilakukan dengan baik pula.

Salah satu aspek yang sangat mendukung kinerja urusan pemerintahan yaitu dengan adanya pengelolaan administrasi pimpinan yang meliputi pelayanan persuratan, pengarsipan dokumen, penyiapan materi dan komunikasi pimpinan serta pelayanan keprotokolan.

Pengelolaan administrasi pimpinan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan pimpinan sebagai pejabat pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)* dapat dilihat dari tata kelola administrasi yang baik serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen yang baik dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pengelolaan administrasi pemerintahan terlebih pada pelayanan pengelolaan administrasi pimpinan.

Pengelolaan administrasi pada pemerintahan daerah yang mutakhir menuju percepatan pembangunan yang maju dan bersaing sudah selayaknya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi infomasi berbasis digital dan sistem daring. Dengan demikian, pelayanan pimpinan yang membutuhkan fasilitasi tata kelola administrasi baik pada aspek administrasi persuratan dan pengarsipan, penyiapan materi pimpinan, fasilitasi komunikasi, pelaksanaan acara dan keprotokoleran dapat dilakukan dengan cepat dengan sistem yang terintegrasi

Biro Umum Sekretariat Daerah menjalankan fungsi utama yaitu pelayanan pimpinan dan perangkat daerah antara lain untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan pelayanan kerumahtanggan di lingkup perkantoran maupun rumah jabatan.

5. Belum optimalnya penyiapan materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan

   Fasilitasi materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan merupakan hal yang sangat perlu mendapat perhatian mengingat tertib dan lancarnya kegaitan pimpinan ditentuntakan pengaturan acaara dan penyiapan materi serta komunikasi antar penyelenggaran kegiatan.

Perlunya peningkatan keterampilan dasar sangat diperlukan dikarenakan sumberdaya yang ada masih kurang memahami terkait keprotokoleran. Pelatihan terkait penyiapan materi pinpinan juga perlu dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas materi pimpinan serta kemampuan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pendampingan pimpinan masih kurang efektif. Selain itu belum adanya ASN yang berertifikasi dan memenuhi standar menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD merupakan susunan awal dari program kerja dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan yang telah direview dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan pada tahapan RKPD.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indicator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4 (T-C.31) berikut ini :

Tabel 2.4 (I-C31)
Hasil Verifikasi Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Barat

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BELANJA UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD				20,158,710,000.00				28,158,710,000.00	
	JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN				20,158,710,000.00				28,158,710,000.00	
					20,158,710,000.00				28,158,710,000.00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		-		3,741,281,000.00		-		5,241,281,000.00	
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		-		1,441,000,000.00		-		1,441,000,000.00	
	Penyelenggaraan Administrasi Kebijakan Pemerintahan									
		Kab Polewali Mandar, Kab Mamuju, Kab Majene, Kab Mamasa, Kab Pasangkayu, Kab Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	7 Dokumen	441,700,000.00	Kab Polewali Mandar, Kab Mamuju, Kab Majene, Kab Mamasa, Kab Pasangkayu, Kab Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	7 Dokumen	441,700,000.00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum									
		Kab Majene, Kab Mamuju, Kab Mamasa, Kab Pasangkayu, Kab Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	5 Dokumen	350,100,000.00	Kab Majene, Kab Mamuju, Kab Mamasa, Kab Pasangkayu, Kab Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	5 Dokumen	350,100,000.00	
	Fasilitasi Penataan Wilayah									
		Kab Pasangkayu, Kab Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	350,100,000.00	Kab Pasangkayu, Kab Mamuju Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	350,100,000.00	
	Pelaksanaan Otonomi Daerah		-		1,450,771,000.00		-		1,450,771,000.00	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD									

		Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangga	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Jaminan Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	700.421.000.00	Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangga	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Jaminan Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	700.421.000.00	
	Pengembangan Otonomi dan Pemekaran Daerah									
		Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Pemekaran Daerah yang Dilaksanakan	2 Dokumen	800.000.000.00	Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Pemekaran Daerah yang Dilaksanakan	2 Dokumen	800.000.000.00	
	Evaluasi dan Pengembangan Pemerintahan									
		Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangga	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengembangan Pemerintahan	3 Laporan	470.000.000.00	Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangga	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengembangan Pemerintahan	3 Laporan	470.000.000.00	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		-		80.140.000.00		-		1.180.140.000.00	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah									
		Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangga	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	900.140.000.00	Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangga	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	900.140.000.00	
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta									
		Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangga	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	4 Dokumen	280.000.000.00	Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangga	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	4 Dokumen	280.000.000.00	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
		Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangga	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	5 Laporan	140.000.000.00	Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangga	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	5 Laporan	140.000.000.00	
3	**PROGRAM OPERASIONAL BIROSET**		-		13.270.000.000.00		-		13.280.000.000.00	
	Fasilitasi Pendidikan Mental Spiritual		-		13.170.000.000.00		-		13.270.000.000.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Spiritual									
		Biro/Ses Kepaldesa, Biro/Ses Kesejahtera, Biro/Ses Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Disiapa	1000 Unit	11.000.000.000.00	Biro/Ses Kepaldesa, Biro/Ses Kesejahtera, Biro/Ses Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Disiapa	1000 Unit	11.000.000.000.00	
	Fasilitasi Keberanggaran Biro Spiritual									

		Kab/Kota, Sekbera dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Lembaga Eks Epiritual yang Dibatasi	Frontage	[illegible]	Kab/Kota, Sekbera dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Lembaga Eks Epiritual yang Dibatasi	Frontage	[illegible]	
	Rp.[illegible] Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Sosial		-		[illegible]		-		[illegible]	
	Pemilihan, Kesetaraan, Ketersertaan, Kualitas dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan									
		Kab/Kota, Sekbera dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Hasil Pasilitasi Kesetaraan, Ketersertaan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	[illegible]	Kab/Kota, Sekbera dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Hasil Pasilitasi Kesetaraan, Ketersertaan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	[illegible]	
	Pemilihan, Kesetaraan dan Ketersertaan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan									
		Kab/Kota, Sekbera dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Hasil Pasilitasi Kesetaraan, Ketersertaan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	[illegible]	Kab/Kota, Sekbera dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Hasil Pasilitasi Kesetaraan, Ketersertaan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	[illegible]	
	Pemilihan, Kesetaraan dan Ketersertaan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial									
		Kab/Kota, Sekbera dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Hasil Pasilitasi Kesetaraan, Ketersertaan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	[illegible]	Kab/Kota, Sekbera dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Hasil Pasilitasi Kesetaraan, Ketersertaan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	[illegible]	
	Rp.[illegible] Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Sosial		-		[illegible]		-		[illegible]	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kependudukan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata									
		Kab/Kota, Sekbera dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kependudukan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Dokumen	[illegible]	Kab/Kota, Sekbera dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kependudukan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Dokumen	[illegible]	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja									

		Kab Bantaeng Bersua Kesesatan Bersua Kalibata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5 Dokumen	480.000.000,00	Kab Bantaeng, Bersua Kesesatan, Bersua Kalibata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5 Dokumen	480.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perlindungan									
		Kab Bantaeng, Bersua dan Kesatuan, Bungin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perlindungan	5 Dokumen	500.000.000,00	Kab Bantaeng, Bersua dan Kesatuan, Bungin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perlindungan	5 Dokumen	500.000.000,00	
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA**		-		**2.338.201.000,00**		-		**2.888.201.000,00**	
	Administrasi Pengelolaan, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah		-		**550.700.000,00**		-		**810.700.000,00**	
	Pengelolaan Sekretariat Pemerintah Daerah									
		Kab Bantaeng, Bersua dan Kesatuan, Bungin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	350.000.000,00	Kab Bantaeng, Bersua dan Kesatuan, Bungin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	350.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Kab Bantaeng, Bersua dan Kesatuan, Bungin	Jumlah Laporan Manual Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	90.210.000,00	Kab Bantaeng, Bersua dan Kesatuan, Bungin	Jumlah Laporan Manual Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	90.210.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Kab Bantaeng, Bersua dan Kesatuan, Bungin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	81.990.000,00	Kab Bantaeng, Bersua dan Kesatuan, Bungin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	81.990.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan SPIP SKPD									

		Koli Bintang, Bintang dan Keydown, Rangin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kesekretariatan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.160.000.00	Koli Bintang, Bintang dan Keydown, Rangin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kesekretariatan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.160.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Koli Bintang, Bintang dan Keydown, Rangin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kesekretariatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	28.300.000.00	Koli Bintang, Bintang dan Keydown, Rangin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kesekretariatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	28.300.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Koli Bintang, Bintang dan Keydown, Rangin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kesekretariatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.120.000.00	Koli Bintang, Bintang dan Keydown, Rangin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kesekretariatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.120.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD									
		Koli Bintang, Bintang dan Keydown, Rangin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kesekretariatan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.160.000.00	Koli Bintang, Bintang dan Keydown, Rangin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kesekretariatan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.160.000.00	
	Administrasi Kegiatan Perangkat Daerah		-		22.220.000.00		-		22.220.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
		Koli Bintang, Bintang dan Keydown, Rangin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Kesekretariatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	9.120.000.00	Koli Bintang, Bintang dan Keydown, Rangin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Kesekretariatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	18.120.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Koli Bintang, Bintang dan Keydown, Rangin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kesekretariatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.210.000.00	Koli Bintang, Bintang dan Keydown, Rangin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kesekretariatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.210.000.00	
	Administrasi Kegiatan Perangkat Daerah		-		488.880.000.00		-		488.880.000.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									

	Kab/Kota, Sekbara dan Kepulauan, Rangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab/Kota, Sekbara dan Kepulauan, Rangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	70.000.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
	Kab/Kota, Sekbara dan Kepulauan, Rangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	60.000.000,00	Kab/Kota, Sekbara dan Kepulauan, Rangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	60.000.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
	Kab/Kota, Sekbara dan Kepulauan, Rangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	199.224.000,00	Kab/Kota, Sekbara dan Kepulauan, Rangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	199.224.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		-		**880.000.000,00**		-		**1.000.000.000,00**	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
	Kab/Kota, Sekbara dan Kepulauan, Rangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	19.999.000,00	Kab/Kota, Sekbara dan Kepulauan, Rangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	99.999.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	Kab/Kota, Sekbara dan Kepulauan, Rangan	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Layanan	810.000.000,00	Kab/Kota, Sekbara dan Kepulauan, Rangan	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Layanan	810.000.000,00	
Pengadaan Bahan/Material									
	Kab/Kota, Sekbara dan Kepulauan, Rangan	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	120.000.000,00	Kab/Kota, Sekbara dan Kepulauan, Rangan	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	120.000.000,00	
Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
	Kab/Kota, Sekbara dan Kepulauan, Rangan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	60.700.000,00	Kab/Kota, Sekbara dan Kepulauan, Rangan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	60.700.000,00	
Pengadaan Bahan Logistik Kantor									

		Kab/Kota, Bantaeng dan Kepulauan Rongkong	Jumlah Roda Belas Lapangan Kantor yang Disediakan	3 Paket	148.900.000,00	Kab/Kota, Bantaeng dan Kepulauan Rongkong	Jumlah Roda Belas Lapangan Kantor yang Disediakan	3 Paket	148.900.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Berupa Pemeliharaan Daerah		-		**60.000.000,00**		-		**60.000.000,00**	
	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya									
		Kab/Kota, Bantaeng dan Kepulauan Rongkong	Jumlah Unit Sarabatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	60.000.000,00	Kab/Kota, Bantaeng dan Kepulauan Rongkong	Jumlah Unit Sarabatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	60.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berupa Pemeliharaan Daerah		-		**127.123.000,00**		-		**127.123.000,00**	
	Pemeliharaan/Perawatan Gedung dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Kab/Kota, Bantaeng dan Kepulauan Rongkong	Jumlah Gedung dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	84.750.000,00	Kab/Kota, Bantaeng dan Kepulauan Rongkong	Jumlah Gedung dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	84.750.000,00	
	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya									
		Kab/Kota, Bantaeng dan Kepulauan Rongkong	Jumlah Perabotan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	69.250.000,00	Kab/Kota, Bantaeng dan Kepulauan Rongkong	Jumlah Perabotan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	169.250.000,00	
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Kab/Kota, Bantaeng dan Kepulauan Rongkong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Disayankan Pajaknya	3 Unit	201.201.000,00	Kab/Kota, Bantaeng dan Kepulauan Rongkong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Disayankan Pajaknya	3 Unit	201.201.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL (RKT)					RANCANGAN AWAL (RKT)				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	10	4	5	6	10	4	5	9	10
	SEKRETARIAT DAERAH KAB/KOTA				**2.222.228.881,00**				**2.221.228.881,00**	
	DAERAH PROVINSI/KOTA/KAB/KOTA PROPINSI/KOTA				**2.222.228.881,00**				**2.221.228.881,00**	
					2.222.228.881,00				**2.221.228.881,00**	

1	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM PEMERINTAH DAERAH**		-		1,600,000,000.00		-		1,600,000,000.00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Gubernur		-		870,000,000.00		-		1,130,000,000.00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan									
		Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	30 Dokumen	600,000,000.00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	30 Dokumen	600,000,000.00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan									
		Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	600 Dokumen	180,000,000.00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	600 Dokumen	600,000,000.00	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Kondisi Hukum Lainnya									
		Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Diakses Informasi Hukumnya	600 Dokumen	170,000,000.00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Diakses Informasi Hukumnya	600 Dokumen	370,000,000.00	
	Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum Kabupaten/Kota									
		Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Disusun	180 Dokumen	600,000,000.00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Disusun	180 Dokumen	600,000,000.00	
	Fasilitasi Bantuan Hukum		-		400,000,000.00		-		700,000,000.00	
	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Hukum									
		Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Jumlah Wasalah Hukum yang Diselesaikan	5 Kasus	600,000,000.00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Jumlah Wasalah Hukum yang Diselesaikan	5 Kasus	600,000,000.00	
	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Non Litigasi dan HAM									

		Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Masalah Hak Ulayat dan HUH yang Diselesaikan	4 Paket	180.000.000.00	Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Masalah Hak Ulayat dan HUH yang Diselesaikan	4 Paket	180.000.000.00	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		-		**1.220.338.891.01**		-		**1.201.338.891.01**	
	Pengembangan, dan Pedoman Evaluasi Perangkat Daerah		1		**181.338.891.01**		1		**201.338.891.01**	
	Pengumpulan Dokumen Perumusan Perangkat Daerah									
		Kab Bentuk, Bentuk dan Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perumusan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000.000.00	Kab Bentuk, Bentuk dan Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perumusan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA (SKPD)									
		Kab Bentuk, Bentuk dan Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKU-SKPD dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Dokumen RKU-SKPD	1 Dokumen	10.000.000.00	Kab Bentuk, Bentuk dan Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKU-SKPD dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Dokumen RKU-SKPD	1 Dokumen	10.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA (SKPD)									
		Kab Bentuk, Bentuk dan Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKU-SKPD dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKU-SKPD	1 Dokumen	8.000.000.00	Kab Bentuk, Bentuk dan Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKU-SKPD dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKU-SKPD	1 Dokumen	8.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA (SKPD									
		Kab Bentuk, Bentuk dan Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPU-SKPD dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Dokumen DPU-SKPD	1 Dokumen	8.000.000.00	Kab Bentuk, Bentuk dan Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPU-SKPD dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Dokumen DPU-SKPD	1 Dokumen	8.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA (SKPD									
		Kab Bentuk, Bentuk dan Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPU-SKPD dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Dokumen Perubahan DPU-SKPD	1 Dokumen	8.000.000.00	Kab Bentuk, Bentuk dan Kecamatan, Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPU-SKPD dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Dokumen Perubahan DPU-SKPD	1 Dokumen	10.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

		Koli Warnaja, Bintang dan Kepahlawan, Ringan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kesesuaian Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	[illegible]	Koli Warnaja, Bintang dan Kepahlawan, Ringan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kesesuaian Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	[illegible]	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Koli Warnaja, Bintang dan Kepahlawan, Ringan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	[illegible]	Koli Warnaja, Bintang dan Kepahlawan, Ringan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	[illegible]	
Subtotal (rp.) Kewajiban Perangkat Daerah			-		50.000.000,00		-		50.000.000,00	
Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Koli Warnaja, Bintang dan Kepahlawan, Ringan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	[illegible]	Koli Warnaja, Bintang dan Kepahlawan, Ringan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	[illegible]	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Koli Warnaja, Bintang dan Kepahlawan, Ringan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	[illegible]	Koli Warnaja, Bintang dan Kepahlawan, Ringan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	[illegible]	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
		Koli Warnaja, Bintang dan Kepahlawan, Ringan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	[illegible]	Koli Warnaja, Bintang dan Kepahlawan, Ringan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	[illegible]	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Koli Warnaja, Bintang dan Kepahlawan, Ringan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	[illegible]	Koli Warnaja, Bintang dan Kepahlawan, Ringan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	[illegible]	
Pengelolaan dan Pengajuan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
		Koli Warnaja, Bintang dan Kepahlawan, Ringan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	[illegible]	Koli Warnaja, Bintang dan Kepahlawan, Ringan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	[illegible]	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										

		Kab/Kantor, Biro/Setara dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran 2022 dan Laporan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran 2022	1 Laporan	[illegible]	Kab/Kantor, Biro/Setara dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran 2022 dan Laporan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran 2022	1 Laporan	[illegible]	
	Pengawasan Pelaporan dan Analisis Pengawas Keuangan Anggaran									
		Kab/Kantor, Biro/Setara dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Dokumen Rangaran dan Laporan Pengawas Realisasi Anggaran	1 Dokumen	[illegible]	Kab/Kantor, Biro/Setara dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Dokumen Rangaran dan Laporan Pengawas Realisasi Anggaran	1 Dokumen	[illegible]	
	Adalah Jual Kepegawaian Perangkat Daerah		-		[illegible]		-		[illegible]	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Kab/Kantor, Biro/Setara dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	[illegible]	Kab/Kantor, Biro/Setara dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	[illegible]	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
		Kab/Kantor, Biro/Setara dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Pakai Pakaian Dinas Beserta Untuk Kelengkapan	1 Paket	[illegible]	Kab/Kantor, Biro/Setara dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Pakai Pakaian Dinas Beserta Untuk Kelengkapan	1 Paket	[illegible]	
	Penatausaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian									
		Kab/Kantor, Biro/Setara dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Dokumen Penatausaan dan Pengelolaan administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	[illegible]	Kab/Kantor, Biro/Setara dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Dokumen Penatausaan dan Pengelolaan administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	[illegible]	
	Adalah Jual Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-		[illegible]		-		[illegible]	
	Pengawasan Pemanfaatan Penatausaan Barang Milik Daerah (BMD)									
		Kab/Kantor, Biro/Setara dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2022	1 Dokumen	[illegible]	Kab/Kantor, Biro/Setara dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2022	1 Dokumen	[illegible]	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada [illegible]									
		Kab/Kantor, Biro/Setara dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada 2022	1 Laporan	[illegible]	Kab/Kantor, Biro/Setara dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada 2022	1 Laporan	[illegible]	
	Adalah Jual Aset Perangkat Daerah		-		[illegible]		-		[illegible]	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Bentuk Koordinasi, Bentuk Konsultasi, Bentuk Kolaborasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	400.000.000,00	Bentuk Koordinasi, Bentuk Konsultasi, Bentuk Kolaborasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	400.000.000,00	
	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangun	Jumlah Dalam Kegiatan Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangun	Jumlah Dalam Kegiatan Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	
	Pengadaan Bahan Logistik Kantor									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangun	Jumlah Dalam Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	80.000.000,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangun	Jumlah Dalam Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	80.000.000,00	
	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangun	Jumlah Dalam Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangun	Jumlah Dalam Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	
	Pengadaan Bahan/Material									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangun	Jumlah Dalam Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangun	Jumlah Dalam Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangun	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangun	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	70.000.000,00	
	Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		10.000.000,00		-		10.000.000,00	
	Pengelolaan Jasa Surat Menyurat									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangun	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangun	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang		-		150.000.000,00		-		280.000.000,00	

	Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya									
		Koli Warnaja, Elektrika dan Kendaraan Rangka	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Diadakan	8 Unit	100.000.000,00	Koli Warnaja, Elektrika dan Kendaraan Rangka	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Diadakan	8 Unit	200.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		**100.000.000,00**		-		**200.000.000,00**	
	Pengadaan Jasa Pendidikan, Biaya Pendidikan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Koli Warnaja, Elektrika dan Kendaraan Rangka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Diadakan dan Dilayanan Dasarnya	11 Unit	300.000.000,00	Koli Warnaja, Elektrika dan Kendaraan Rangka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Diadakan dan Dilayanan Dasarnya	11 Unit	600.000.000,00	
	Pengadaan Jasa Pendidikan, Biaya Pendidikan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Koli Warnaja, Elektrika dan Kendaraan Rangka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan dan Dilayanan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	80.000.000,00	Koli Warnaja, Elektrika dan Kendaraan Rangka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan dan Dilayanan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	160.000.000,00	
	Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Koli Warnaja, Elektrika dan Kendaraan Rangka	Jumlah Bangunan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	20.000.000,00	Koli Warnaja, Elektrika dan Kendaraan Rangka	Jumlah Bangunan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	20.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Koli Warnaja, Elektrika dan Kendaraan Rangka	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20.000.000,00	Koli Warnaja, Elektrika dan Kendaraan Rangka	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20.000.000,00	

KD	RANCANGAN AWAL (RKPD)					RANCANGAN AWAL (RKPD)					KAPASITAS PRATIDE
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	12	4	5	6	10	4	5	6	12
	SEKRETARIAT DAERAH KAB PENGADAAN SAR PENGADAAN PERLENGKAPAN				**7.850.271.147,00**				**8.410.271.147,00**	
	JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**7.850.271.147,00**				**8.410.271.147,00**	
					7.850.271.147,00				**8.410.271.147,00**	

1	**PENDIDIKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**		Penerimaan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pendanaan dan Pembangunan	100 Persen	2,750,000,000.00		Penerimaan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pendanaan dan Pembangunan	100 Persen	3,120,000,000.00	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan		Penerimaan Pelaksanaan Sub Kegiatan	80 Persen	1,250,000,000.00		Penerimaan Pelaksanaan Sub Kegiatan	80 Persen	1,450,000,000.00	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro									
		Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	12 Dokumen	1,250,000,000.00	Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	12 Dokumen	1,250,000,000.00	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro									
		Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	500,000,000.00	Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	500,000,000.00	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Bantuan Bagi Alat		-		450,000,000.00		-		450,000,000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perizinan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
		Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perizinan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen	500,000,000.00	Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perizinan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen	500,000,000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan dan Lingkungan Hidup									
		Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan dan Lingkungan Hidup	3 Dokumen	500,000,000.00	Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan dan Lingkungan Hidup	3 Dokumen	500,000,000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Sr									
		Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Sr	10 Dokumen	500,000,000.00	Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama Bentuk Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Sr	10 Dokumen	500,000,000.00	

	Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan [illegible] dan [illegible]		-		1,150,000,000.00		-		1,150,000,000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Batas Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha									
		Kab Mamuju Sinkronisasi dan Koordinasi, Survei Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Keseminar, Sinkronisasi Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4 Dokumen	400,000,000.00	Kab Mamuju Sinkronisasi dan Koordinasi, Survei Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Keseminar, Sinkronisasi Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4 Dokumen	400,000,000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sampah									
		Survei Kab/Kota Survei Kecamatan, Survei Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Keseminar, Sinkronisasi Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Limbah dan Sampah	4 Dokumen	300,000,000.00	Survei Kab/Kota Survei Kecamatan, Survei Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Keseminar, Sinkronisasi Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Limbah dan Sampah	4 Dokumen	300,000,000.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD									
		Kab Mamuju Survei Kecamatan, Survei Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Keseminar, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	3 Dokumen	300,000,000.00	Kab Mamuju Survei Kecamatan, Survei Kab/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Keseminar, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	3 Dokumen	300,000,000.00	
3	**[illegible]** **[illegible]** **[illegible]** **[illegible]**		-		**[illegible],000,000.00**		-		**[illegible],000,000.00**	
	Pengembalian Kekurangan Pelebihan Pembayaran Bantuan		-		**[illegible],000,000.00**		-		**[illegible],000,000.00**	
	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (DBH)									
		Survei Kota/Kab Survei Kecamatan, Survei Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (DBH)	12 Laporan	600,000,000.00	Survei Kota/Kab Survei Kecamatan, Survei Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (DBH)	12 Laporan	600,000,000.00	
	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (Wilayah)									
		Survei Kota/Kab Survei Kecamatan, Survei Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	12 Laporan	516,000,000.00	Survei Kota/Kab Survei Kecamatan, Survei Kab/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	12 Laporan	516,000,000.00	

	Pelayanan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		-		220.000.000,00		-		220.000.000,00	
	Pelayanan Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
		Bantuan Kota/Kab. Bantuan Kecamatan Bantuan Kel/Desa	Jumlah Layanan Hasil Dekonsentrasi Pembangunan Daerah	4 Layanan	220.000.000,00	Bantuan Kota/Kab. Bantuan Kecamatan Bantuan Kel/Desa	Jumlah Layanan Hasil Dekonsentrasi Pembangunan Daerah	4 Layanan	220.000.000,00	
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAH DI LINGKUP PROVINSI**		-		5.118.271.117,00		-		5.888.271.117,00	
	Pemeliharaan, Penggunaan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah		-		180.000.621,00		-		220.000.621,00	
	Pengawasan Dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah									
		Kab Bantaeng Bantaeng dan Pendidikan Bantaeng	Jumlah Dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah	4 Dokumen	47.672.660,00	Kab Bantaeng Bantaeng dan Pendidikan Bantaeng	Jumlah Dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah	4 Dokumen	47.672.660,00	
	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA SKPD									
		Kab Bantaeng Bantaeng dan Pendidikan Bantaeng	Jumlah Dokumen RKU-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKU-SKPD	2 Dokumen	16.672.660,00	Kab Bantaeng Bantaeng dan Pendidikan Bantaeng	Jumlah Dokumen RKU-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKU-SKPD	2 Dokumen	16.672.660,00	
	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Perubahan RKA SKPD									
		Kab Bantaeng Bantaeng dan Pendidikan Bantaeng	Jumlah Dokumen Perubahan RKU-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKU-SKPD	2 Dokumen	16.672.660,00	Kab Bantaeng Bantaeng dan Pendidikan Bantaeng	Jumlah Dokumen Perubahan RKU-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKU-SKPD	2 Dokumen	16.672.660,00	
	Koordinasi dan Pengawasan DPA SKPD									
		Kab Bantaeng Bantaeng dan Pendidikan Bantaeng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	16.672.660,00	Kab Bantaeng Bantaeng dan Pendidikan Bantaeng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	16.672.660,00	
	Koordinasi dan Pengawasan Perubahan DPA SKPD									
		Kab Bantaeng Bantaeng dan Pendidikan Bantaeng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	16.672.660,00	Kab Bantaeng Bantaeng dan Pendidikan Bantaeng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	16.672.660,00	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKPA)									
	Kab Bantaeng, Bimtara dan Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKPA) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKPA	1 Laporan	18.872.660.00	Kab Bantaeng, Bimtara dan Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKPA) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (IKPA	1 Laporan	18.872.660.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Kab Bantaeng, Bimtara dan Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.872.660.00	Kab Bantaeng, Bimtara dan Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.872.660.00	
Subtotal (Lv.) Kewajiban Perangkat Daerah		-		150.824.221.00		-		110.824.221.00	
Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
	Kab Bantaeng, Bimtara dan Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	6.260.880.00	Kab Bantaeng, Bimtara dan Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	10.260.880.00	
Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengadaan/Distribusi Kewajiban (BKD)									
	Kab Bantaeng, Bimtara dan Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Penyusunan Hasil Kewajiban BKD	2 Dokumen	6.260.880.00	Kab Bantaeng, Bimtara dan Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Penyusunan Hasil Kewajiban BKD	2 Dokumen	6.260.880.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Kesehatan (BKD)									
	Bimtara Kota/Kab, Bimtara Kepulauan, Bimtara Kab/Dimtara Kab Bantaeng, Bimtara dan Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Kesehatan BKD	1 Dokumen	6.260.880.00	Bimtara Kota/Kab, Bimtara Kepulauan, Bimtara Kab/Dimtara Kab Bantaeng, Bimtara dan Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Kesehatan BKD	1 Dokumen	10.260.880.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (BKD)									
	Kab Bantaeng, Bimtara dan Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022	4 Laporan	6.260.880.00	Kab Bantaeng, Bimtara dan Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022	4 Laporan	6.260.880.00	

		Kab.Banggai, Sekretaris dan Kepaniteraan, Sekretaris	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.260.886.00	Kab.Banggai, Sekretaris dan Kepaniteraan, Sekretaris	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.260.886.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SIPD									
		Kab.Banggai, Sekretaris dan Kepaniteraan, Sekretaris	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SIPD dan Laporan Neraca/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SIPD	4 Laporan	71.788.018.00	Kab.Banggai, Sekretaris dan Kepaniteraan, Sekretaris	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SIPD dan Laporan Neraca/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SIPD	4 Laporan	71.788.018.00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran									
		Kab.Banggai, Sekretaris dan Kepaniteraan, Sekretaris	Jumlah Dokumen Dokumen dan Analisis Progress Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.260.886.00	Kab.Banggai, Sekretaris dan Kepaniteraan, Sekretaris	Jumlah Dokumen Dokumen dan Analisis Progress Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.260.886.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		886.721.821.00		-		886.721.821.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
		Kab.Banggai, Sekretaris dan Kepaniteraan, Sekretaris	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	58.127.680.00	Kab.Banggai, Sekretaris dan Kepaniteraan, Sekretaris	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	58.127.680.00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
		Kab.Banggai, Sekretaris dan Kepaniteraan, Sekretaris	Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50 Unit	58.127.680.00	Kab.Banggai, Sekretaris dan Kepaniteraan, Sekretaris	Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50 Unit	58.127.680.00	
	Pendidikan dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian									
		Kab.Banggai, Sekretaris dan Kepaniteraan, Sekretaris	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	58.127.680.00	Kab.Banggai, Sekretaris dan Kepaniteraan, Sekretaris	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	58.127.680.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
		Kab.Banggai, Sekretaris dan Kepaniteraan, Sekretaris	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20 Dokumen	110.127.680.00	Kab.Banggai, Sekretaris dan Kepaniteraan, Sekretaris	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20 Dokumen	110.127.680.00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai									

		Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Dokumen Kinerja Pegawai	30 Dokumen	33.127.680.00	Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Dokumen Kinerja Pegawai	30 Dokumen	33.127.680.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	33.127.680.00	Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	33.127.680.00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	33.127.680.00	Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	33.127.680.00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	33.127.680.00	Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	330.127.680.00	
	Subtotal Aset Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang		-		58.110.480.00		-		58.110.480.00	
	Pengelolaan Pemanfaatan Kerjasama Barang Milik Daerah (BMD)									
		Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Pemanfaatan Kerjasama Barang Milik Daerah BMD	1 Dokumen	16.777.847.00	Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Pemanfaatan Kerjasama Barang Milik Daerah BMD	1 Dokumen	16.777.847.00	
	Koordinasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah (BMD)									
		Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pembinaan Barang Milik Daerah BMD	2 Laporan	33.777.847.00	Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Pembinaan Barang Milik Daerah BMD	2 Laporan	33.777.847.00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada BKPD									
		Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada BKPD	12 Laporan	16.777.847.00	Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada BKPD	12 Laporan	16.777.847.00	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BKPD									
		Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BKPD	12 Laporan	33.777.847.00	Kab/Kota, Sekbera dan Kesbangpol Sekbera	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BKPD	12 Laporan	33.777.847.00	
	Subtotal Aset Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang		-		1.478.270.751.00		-		1.488.270.751.00	

	Pengadaan Komputer Unit/Perangkat Pengolah Data									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Paket Pengadaan Komputer Unit/Perangkat Pengolah Data yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Paket Pengadaan Komputer Unit/Perangkat Pengolah Data yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	280.000.000,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	280.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	
	Pengadaan Bahan Logistik Kantor									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	162.813.299,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	162.813.299,00	
	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	162.813.299,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	162.813.299,00	
	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	162.813.299,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	162.813.299,00	
	Pengadaan Bahan Material									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	162.813.299,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	162.813.299,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Layanan	280.000.000,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bantaeng	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Layanan	280.000.000,00	
	Pemeliharaan Ang. Gedung pada SKPD									

		Kab/Kota, Kecamatan dan Kepulauan, Kantoran	Jumlah Saluran Terselesaikan Jaig Drama pada SIPD	10 Saluran	142.313.299.00	Kab/Kota, Kecamatan dan Kepulauan, Kantoran	Jumlah Saluran Terselesaikan Jaig Drama pada SIPD	10 Saluran	42.313.299.00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Kab/Kota, Kecamatan dan Kepulauan, Kantoran	Jumlah Saluran Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD	4 Dokumen	142.313.299.00	Kab/Kota, Kecamatan dan Kepulauan, Kantoran	Jumlah Saluran Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD	4 Dokumen	142.313.299.00	
	Pengelolaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah		-		**142.313.299.00**		-		**142.313.299.00**	
	Pengelolaan Jasa Surat Menyurat									
		Kab/Kota, Kecamatan dan Kepulauan, Kantoran	Jumlah Layanan Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	10 Layanan	142.313.299.00	Kab/Kota, Kecamatan dan Kepulauan, Kantoran	Jumlah Layanan Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	10 Layanan	142.313.299.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		**1.000.000.000.00**		-		**1.000.000.000.00**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Kab/Kota, Kecamatan dan Kepulauan, Kantoran	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	656.821.000.00	Kab/Kota, Kecamatan dan Kepulauan, Kantoran	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	656.821.000.00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Kab/Kota, Kecamatan dan Kepulauan, Kantoran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	680.000.000.00	Kab/Kota, Kecamatan dan Kepulauan, Kantoran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	680.000.000.00	
	Pengadaan Mobil									
		Kab/Kota, Kecamatan dan Kepulauan, Kantoran	Jumlah Mobil Dinas yang Disediakan	1 Paket	182.774.032.00	Kab/Kota, Kecamatan dan Kepulauan, Kantoran	Jumlah Mobil Dinas yang Disediakan	1 Paket	182.774.032.00	
	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya									
		Kab/Kota, Kecamatan dan Kepulauan, Kantoran	Jumlah unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.774.000.00	Kab/Kota, Kecamatan dan Kepulauan, Kantoran	Jumlah unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	32.774.000.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Kab/Kota, Kecamatan dan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1 Unit	5.774.000.00	Kab/Kota, Kecamatan dan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1 Unit	5.774.000.00	

		Kondisi awal Sintara	Bangunan lainnya yang Dioptimalkan			Kondisi awal Sintara	Bangunan lainnya yang Dioptimalkan			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Kab Mamuju Sintara dan Kepulauan Sintara	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dioptimalkan	1 Unit	2.771.822.00	Kab Mamuju Sintara dan Kepulauan Sintara	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dioptimalkan	1 Unit		20.771.822.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas	-			**201.888.823.00**		-			**201.888.823.00**
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Kab Mamuju Sintara dan Kepulauan Sintara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan Dilayanan Dgnnya	4 Unit	700.000.000.00	Kab Mamuju Sintara dan Kepulauan Sintara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan Dilayanan Dgnnya	4 Unit		770.000.000.00
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Kab Mamuju Sintara dan Kepulauan Sintara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dilayanan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	80.166.822.00	Kab Mamuju Sintara dan Kepulauan Sintara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dilayanan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		80.166.822.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Kab Mamuju Sintara dan Kepulauan Sintara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	21.099.991.00	Kab Mamuju Sintara dan Kepulauan Sintara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		21.099.991.00
	Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Kab Mamuju Sintara dan Kepulauan Sintara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	19.000.000.00	Kab Mamuju Sintara dan Kepulauan Sintara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		19.000.000.00
	Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Kab Mamuju Sintara dan Kepulauan Sintara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	19.000.000.00	Kab Mamuju Sintara dan Kepulauan Sintara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		19.000.000.00

NO	HANCANGAN AWAL RKPD					HANCANGAN AWAL RKPD				CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAHUN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TAHUN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	12	4	8	9	10	4	8	9	12
	SEKRETARIAT DAERAH KOORDINASI DAN LAIN				**1.000.000.000.00**				**1.000.000.000.00**	

	[illegible]				[illegible]				[illegible]	
					[illegible]				[illegible]	
1	[illegible]		1		1,372,000,000.00		1		1,372,000,000.00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1		850,000,000.00		1		700,000,000.00	
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Pemerintah Kerajaan	Jumlah Layanan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Layanan	[illegible]	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Pemerintah Kerajaan	Jumlah Layanan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Layanan	[illegible]	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Pemerintah Publik	Jumlah Layanan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Layanan	[illegible]	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Pemerintah Publik	Jumlah Layanan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Layanan	[illegible]	
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Pemerintah Publik	Jumlah Layanan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Layanan	[illegible]	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Pemerintah Publik	Jumlah Layanan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Layanan	[illegible]	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1		700,000,000.00		1		650,000,000.00	
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Pemerintah Kerajaan	Jumlah Layanan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Layanan	[illegible]	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Pemerintah Kerajaan	Jumlah Layanan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Layanan	[illegible]	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Pemerintah Kerajaan	Jumlah Layanan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Layanan	[illegible]	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Pemerintah Kerajaan	Jumlah Layanan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Layanan	[illegible]	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Pemerintah Kerajaan	Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Layanan	[illegible]	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Pemerintah Kerajaan	Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Layanan	[illegible]	

	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Pengadaan Barang dan Jasa		-		412.000.000,00		-		412.000.000,00	
	Pemeliharaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa									
		Kab Bantaya, Bantaya dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen pengadaan yang dianjurkan Pemerintah Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	300.000.000,00	Kab Bantaya, Bantaya dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen pengadaan yang dianjurkan Pemerintah Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	300.000.000,00	
	Pemeliharaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa									
		Kab Bantaya, Bantaya dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	300.000.000,00	Kab Bantaya, Bantaya dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	300.000.000,00	
	Pemberangan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa									
		Kab Bantaya, Bantaya dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Pemberangan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	312.000.000,00	Kab Bantaya, Bantaya dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Pemberangan Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	312.000.000,00	
2	**PROGRAM PENINGKATAN UKURAN KESEPETIHAN (UPDA PROVISI)**		-		1.438.000.000,00		-		1.438.000.000,00	
	Pemeliharaan, Pengangguran, dan Pelatihan Pegawai Pemerintah Daerah		-		140.000.000,00		-		140.000.000,00	
	Pengawasan Sebelum Pemeliharaan Pemerintah Daerah									
		Kab Bantaya, Bantaya dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	60.000.000,00	Kab Bantaya, Bantaya dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	60.000.000,00	
	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA SKPD									
		Kab Bantaya, Bantaya dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab Bantaya, Bantaya dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Perubahan RKA SKPD									
		Kab Bantaya, Bantaya dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab Bantaya, Bantaya dan Kepulauan, Rangas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Koordinasi dan Pengawasan DPA SKPD									

		Kab/Kota, Biro/Setara dan Kepaldesa, Rangda	Jumlah Dokumen DPA/DPPA dan Laporan Hasil Kesekitan/ Penyusunan Dokumen DPA/DPPA	1 Dokumen	10.000.000.00	Kab/Kota, Biro/Setara dan Kepaldesa, Rangda	Jumlah Dokumen DPA/DPPA dan Laporan Hasil Kesekitan/ Penyusunan Dokumen DPA/DPPA	1 Dokumen	10.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Kab/Kota, Biro/Setara dan Kepaldesa, Rangda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kesekitan/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000.00	Kab/Kota, Biro/Setara dan Kepaldesa, Rangda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kesekitan/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Kab/Kota, Biro/Setara dan Kepaldesa, Rangda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	40.000.000.00	Kab/Kota, Biro/Setara dan Kepaldesa, Rangda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	40.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA, DPPA									
		Kab/Kota, Biro/Setara dan Kepaldesa, Rangda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA/DPPA dan Laporan Hasil Kesekitan/ Penyusunan Dokumen Perubahan DPA/DPPA	1 Dokumen	10.000.000.00	Kab/Kota, Biro/Setara dan Kepaldesa, Rangda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA/DPPA dan Laporan Hasil Kesekitan/ Penyusunan Dokumen Perubahan DPA/DPPA	1 Dokumen	10.000.000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-		20.000.000.00		-		20.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Kab/Kota, Biro/Setara dan Kepaldesa, Rangda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kesekitan/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000.00	Kab/Kota, Biro/Setara dan Kepaldesa, Rangda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kesekitan/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan/Semesteran SKPD									
		Kab/Kota, Biro/Setara dan Kepaldesa, Rangda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Kesekitan/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000.00	Kab/Kota, Biro/Setara dan Kepaldesa, Rangda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Kesekitan/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		100.000.000.00		-		100.000.000.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Kab/Kota, Biro/Setara dan Kepaldesa, Rangda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000.00	Kab/Kota, Biro/Setara dan Kepaldesa, Rangda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000.00	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
		Kab.Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangsa	Jumlah Paket Belanja Dinas Beserta Untuk Kelengkapan	72 Paket	80.000.000,00	Kab.Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangsa	Jumlah Paket Belanja Dinas Beserta Untuk Kelengkapan	72 Paket	80.000.000,00
	Administrasi Kependudukan Daerah		-		480.000.000,00		-		480.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Kab.Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangsa	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Layanan	300.000.000,00	Kab.Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangsa	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Layanan	300.000.000,00
	Pengadaan Bahan Logistik Kantor								
		Kab.Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangsa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	100.000.000,00	Kab.Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangsa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	100.000.000,00
	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Kab.Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangsa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	Kab.Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangsa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00
	Pengadaan Bahan Material								
		Kab.Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangsa	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	30 Paket	150.000.000,00	Kab.Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangsa	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	30 Paket	150.000.000,00
	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		10.000.000,00		-		10.000.000,00
	Pengadaan Jasa Surat Menyurat								
		Kab.Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangsa	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Layanan	10.000.000,00	Kab.Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan, Bangsa	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Layanan	10.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		70.000.000,00		-		70.000.000,00
	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya								

		Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/ Kongsi	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dioperasikan	Unit	70.000.000,00	Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/ Kongsi	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dioperasikan	Unit	70.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		120.000.000,00		-		120.000.000,00	
	Pengadaan Jasa Pendidikan, Biaya Pendidikan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Pendidikan Dinas Jabatan									
		Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/ Kongsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	60.000.000,00	Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/ Kongsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	120.000.000,00	
	Pengadaan Jasa Pendidikan, Biaya Pendidikan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/ Kongsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perlengkapannya	Unit	60.000.000,00	Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/ Kongsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perlengkapannya	Unit	60.000.000,00	

KD	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEADAAN AWAL IKU'D				KEADAAN AWAL IKU'D				KEADAAN AKHIR
		TARGET	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	10	4	5	6	10	4	5	6	10
	SEKRETARIAT DAERAH KAB/KOTA				**3.600.000.000,00**				**3.600.000.000,00**	
	JUMLAH PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN				**3.600.000.000,00**				**3.600.000.000,00**	
					3.600.000.000,00				**3.600.000.000,00**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		-		**1.600.000.000,00**		-		**1.600.000.000,00**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah		-		**800.000.000,00**		-		**800.000.000,00**	
	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Rumah									
		Kota/Kab, Kecamatan dan Kelurahan/ Kongsi	Jumlah Bangunan Hasil Pemenuhan Kebutuhan Perumahan	1 Bangunan	200.000.000,00	Kota/Kab, Kecamatan dan Kelurahan/ Kongsi	Jumlah Bangunan Hasil Pemenuhan Kebutuhan Perumahan	1 Bangunan	200.000.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Kawasan/Kota									

		Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Pelaksanaan Kelembagaan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	150.000.000.00	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Pelaksanaan Kelembagaan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	150.000.000.00	
	Pemetaan Analisis Jabatan									
		Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	3 Dokumen	450.000.000.00	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	3 Dokumen	450.000.000.00	
	Penilaian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		-		**150.000.000.00**		-		**150.000.000.00**	
	Pelaksanaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi									
		Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	180.000.000.00	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	240.000.000.00	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja									
		Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	7 Dokumen	140.000.000.00	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	7 Dokumen	140.000.000.00	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja									
		Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	Jumlah Layanan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Layanan	110.000.000.00	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	Jumlah Layanan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Layanan	110.000.000.00	
	Pengelolaan Tata/Layanan Pemerintahan									
		Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Layanan Pemerintahan	30 Dokumen	120.000.000.00	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Layanan Pemerintahan	30 Dokumen	120.000.000.00	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik									

		Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	300.000.000.00	Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	270.000.000.00	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		-		**1.220.000.000.00**		-		**1.200.000.000.00**	
	Pengembangan, dan Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		1		**450.000.000.00**		1		**450.000.000.00**	
		Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen Dokumen	140.000.000.00	Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen Dokumen	140.000.000.00	
		Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP) dan Laporan Hasil Verifikasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP)	3 Laporan	180.000.000.00	Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP) dan Laporan Hasil Verifikasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP)	3 Laporan	180.000.000.00	
		Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	90.000.000.00	Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	90.000.000.00	
	Administrasi Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		-		**60.000.000.00**		-		**60.000.000.00**	
		Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	300.000.000.00	Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	270.000.000.00	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		-		**1.220.000.000.00**		-		**1.200.000.000.00**	
	Pengembangan, dan Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		1		**450.000.000.00**		1		**450.000.000.00**	
		Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen Dokumen	140.000.000.00	Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen Dokumen	140.000.000.00	
		Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP) dan Laporan Hasil Verifikasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP)	3 Laporan	180.000.000.00	Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP) dan Laporan Hasil Verifikasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP)	3 Laporan	180.000.000.00	
		Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	90.000.000.00	Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	90.000.000.00	
	Administrasi Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		-		**60.000.000.00**		-		**60.000.000.00**	
		Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	300.000.000.00	Bentuk Kota/Kab. Bentuk Kecamatan Bentuk Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Realisasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	270.000.000.00	

		Rincian Kode/Kode Rincian Kewenangan Rincian Kode/Desa	Jumlah Dapat Berkesesuaian Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10.000.000.00	Rincian Kode/Kode Rincian Kewenangan Rincian Kode/Desa	Jumlah Dapat Berkesesuaian Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10.000.000.00	
	Subtotal Jasa Layanan Perangkat Daerah		-		652.850.000.00		-		652.850.000.00	
	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Rincian Kode/Kode Rincian Kewenangan Rincian Kode/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket	50.000.000.00	Rincian Kode/Kode Rincian Kewenangan Rincian Kode/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket	50.000.000.00	
	Pengadaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor									
		Rincian Kode/Kode Rincian Kewenangan Rincian Kode/Desa	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.000.000.00	Rincian Kode/Kode Rincian Kewenangan Rincian Kode/Desa	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.000.000.00	
	Pengadaan Perabotan Rumah Tangga									
		Rincian Kode/Kode Rincian Kewenangan Rincian Kode/Desa	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10.000.000.00	Rincian Kode/Kode Rincian Kewenangan Rincian Kode/Desa	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10.000.000.00	
	Pengadaan Bahan Logistik Kantor									
		Rincian Kode/Kode Rincian Kewenangan Rincian Kode/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	40.000.000.00	Rincian Kode/Kode Rincian Kewenangan Rincian Kode/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	40.000.000.00	
	Pengadaan Bahan Material									
		Rincian Kode/Kode Rincian Kewenangan Rincian Kode/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	80 Paket	80.000.000.00	Rincian Kode/Kode Rincian Kewenangan Rincian Kode/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	80 Paket	80.000.000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

		Belanja Kontribusi Belanja Konsumsi dan Belanja Kontribusi	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Layanan	280.000.000,00	Belanja Kontribusi Belanja Konsumsi dan Belanja Kontribusi	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Layanan	280.000.000,00	
	Pemeliharaan Arsip (Inaktif) pada SKPD									
		Belanja Kontribusi Belanja Konsumsi dan Belanja Kontribusi	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Arsip Inaktif pada SKPD	10 Dokumen	6.000.000,00	Belanja Kontribusi Belanja Konsumsi dan Belanja Kontribusi	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Arsip Inaktif pada SKPD	10 Dokumen	6.000.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Belanja Kontribusi Belanja Konsumsi dan Belanja Kontribusi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Belanja Kontribusi Belanja Konsumsi dan Belanja Kontribusi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		**30.000.000,00**		-		**30.000.000,00**	
	Pengadaan Mobil									
		Belanja Kontribusi Belanja Konsumsi dan Belanja Kontribusi	Jumlah Roda Empat yang Diadakan	30 Roda	30.000.000,00	Belanja Kontribusi Belanja Konsumsi dan Belanja Kontribusi	Jumlah Roda Empat yang Diadakan	10 Roda	30.000.000,00	
	Pengadaan Alat Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		**10.000.000,00**		-		**10.000.000,00**	
	Pengadaan Jasa Surat Menyurat									
		Belanja Kontribusi Belanja Konsumsi dan Belanja Kontribusi	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Layanan	10.000.000,00	Belanja Kontribusi Belanja Konsumsi dan Belanja Kontribusi	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Layanan	10.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		**117.000.000,00**		-		**117.000.000,00**	
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

		Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Disayarkan Pajak dan Perlengkapannya	1 Unit	Rp2.000.000.00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Disayarkan Pajak dan Perlengkapannya	1 Unit	Rp2.000.000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp3.000.000.00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp3.000.000.00	

KD	KANCANGAN AWAL (RKPD)					KANCANGAN AWAL (RKPD)				SARANA PRATIKI
	PROGRAM (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	TARGET CAPAIAN	KPRUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	10	4	5	6	10	4	5	6	10
	SEKRETARIAT DAERAH KAB. LOLIN				**100.000.000.000,00**				**110.000.000.000,00**	
	DAERAH PROVINSI DAERAH PROVINSI				**100.000.000.000,00**				**110.000.000.000,00**	
					100.000.000.000,00				**110.000.000.000,00**	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		-		**100.000.000.000,00**		-		**110.000.000.000,00**	
	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai Evaluasi Internal Lingkup Eks Umum Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Eks Umum Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Eks Umum Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Eks Umum	10 Poin 10 Poin 10 Poin 30 Poin	360,710,714.00		Nilai Evaluasi Internal Lingkup Eks Umum Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup Eks Umum Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup Eks Umum Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Eks Umum	10 Poin 10 Poin 10 Poin 30 Poin	360,710,714.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Koordinasi, Konsultasi, Rapat dan Perjalanan Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	314,200,000.00	Koordinasi, Konsultasi, Rapat dan Perjalanan Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	314,200,000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	350,750,000.00	Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	350,750,000.00	

		Keadaan/ Keluaran				Keadaan/ Keluaran				
	Koordinasi dan Pengumpulan Laporan Capaian Kinerja dan Aliran Realisasi Kinerja (EKIN)									
		Kab Bintuja, Aimbaca dan Kepulauan Raiyan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Aliran Realisasi Kinerja (EKIN) dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Aliran Realisasi Kinerja (EKIN)	3 Laporan	27.171.279.00	Kab Bintuja, Aimbaca dan Kepulauan Raiyan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Aliran Realisasi Kinerja (EKIN) dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Aliran Realisasi Kinerja (EKIN)	3 Laporan	27.171.279.00	
	Koordinasi dan Pengawasan Penelaahan DPA (EKIN)									
		Kab Bintuja, Aimbaca dan Kepulauan Raiyan	Jumlah Dokumen Penelaahan DPA-EKIN dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Dokumen Penelaahan DPA-EKIN	1 Dokumen	39.859.501.00	Kab Bintuja, Aimbaca dan Kepulauan Raiyan	Jumlah Dokumen Penelaahan DPA-EKIN dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Dokumen Penelaahan DPA-EKIN	1 Dokumen	39.859.501.00	
	Koordinasi dan Pengawasan DPA (EKIN)									
		Kab Bintuja, Aimbaca dan Kepulauan Raiyan	Jumlah Dokumen DPA-EKIN dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan DokumenDPA-EKIN	1 Dokumen	21.979.616.00	Kab Bintuja, Aimbaca dan Kepulauan Raiyan	Jumlah Dokumen DPA-EKIN dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan DokumenDPA-EKIN	1 Dokumen	21.979.616.00	
	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen Penelaahan RKA (EKIN)									
		Kab Bintuja, Aimbaca dan Kepulauan Raiyan	Jumlah Dokumen Penelaahan RKA-EKIN dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Dokumen Penelaahan RKA-EKIN	1 Dokumen	48.371.388.00	Kab Bintuja, Aimbaca dan Kepulauan Raiyan	Jumlah Dokumen Penelaahan RKA-EKIN dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Dokumen Penelaahan RKA-EKIN	1 Dokumen	48.371.388.00	
	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA (EKIN)									
		Kab Bintuja, Aimbaca dan Kepulauan Raiyan	Jumlah Dokumen RKA-EKIN dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Dokumen RKA-EKIN	1 Dokumen	43.535.287.00	Kab Bintuja, Aimbaca dan Kepulauan Raiyan	Jumlah Dokumen RKA-EKIN dan Laporan Hasil Kesehatan Penyusunan Dokumen RKA-EKIN	1 Dokumen	43.535.287.00	
	Administrasi Kantor Kepangkatan Pengelolaan Gaji		-		33.871.227.120.00		-		33.871.227.120.00	
	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Kab Bintuja, Aimbaca dan Kepulauan Raiyan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	217.992.853.00	Kab Bintuja, Aimbaca dan Kepulauan Raiyan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	217.992.853.00	
	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN									

		Kab/Kota, Sekretariat dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Orang yang Memenuhi Cpl dan Tunjangan JJN	3565 Orang/ Bulan	32.432.900.649,00	Kab/Kota, Sekretariat dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Orang yang Memenuhi Cpl dan Tunjangan JJN	3565 Orang/ Bulan	32.432.900.649,00	
	Kesekretaris dan Pelaksanaan Sekretaris DKPD									
		Kab/Kota, Sekretariat dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Dokumen Hasil Kesekretaris dan Pelaksanaan Jumlens DKPD	1 Dokumen	607.555.555,00	Kab/Kota, Sekretariat dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Dokumen Hasil Kesekretaris dan Pelaksanaan Jumlens DKPD	1 Dokumen	607.555.555,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan/Urusan Keuangan DKPD									
		Kab/Kota, Sekretariat dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan/Hasil Keuangan DKPD	1200 Dokumen	1.281.939.883,00	Kab/Kota, Sekretariat dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan/Hasil Keuangan DKPD	1200 Dokumen	1.281.939.883,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran DKPD									
		Kab/Kota, Sekretariat dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran DKPD dan Laporan Kesekretaris/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran DKPD	10 Laporan	32.527.425,00	Kab/Kota, Sekretariat dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran DKPD dan Laporan Kesekretaris/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran DKPD	10 Laporan	32.527.425,00	
	Penggabaan dan Pengajuan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
		Kab/Kota, Sekretariat dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	130.068.873,00	Kab/Kota, Sekretariat dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	130.068.873,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun DKPD									
		Kab/Kota, Sekretariat dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DKPD dan Laporan Hasil Kesekretaris/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun DKPD	2 Laporan	66.000.000,00	Kab/Kota, Sekretariat dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DKPD dan Laporan Hasil Kesekretaris/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun DKPD	2 Laporan	66.000.000,00	
	Sekretariat Pengawasan Perangkat Daerah		-		**1.858.811.181,00**		-		**1.858.811.181,00**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Kab/Kota, Sekretariat dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	607.740.000,00	Kab/Kota, Sekretariat dan Kepaldesan, Rangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	707.740.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

		Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangan	Jumlah Dokumen Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	79.276.418.00	Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangan	Jumlah Dokumen Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	79.276.418.00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai									
		Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai	70 Dokumen	161.368.228.00	Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pegawai	70 Dokumen	161.368.228.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
		Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	37 Dokumen	190.921.048.00	Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	37 Dokumen	190.921.048.00	
	Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian									
		Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangan	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengelolaan administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	160.768.760.00	Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangan	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengelolaan administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	160.768.760.00	
	Pengelolaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
		Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangan	Jumlah Total Pakaian Dinas Beserta Jumlah Kelengkapan	8 Pakai	296.952.823.00	Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangan	Jumlah Total Pakaian Dinas Beserta Jumlah Kelengkapan	8 Pakai	296.952.823.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Pengguna Daerah		-		8,110,21,1,810.01		-		8,110,21,1,810.01	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada BKAD									
		Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada BKAD	3 Laporan	887.333.333.00	Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada BKAD	3 Laporan	887.333.333.00	
	Rekonsiliasi dan Penggunaan Laporan Barang Milik Daerah pada BKAD									
		Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada BKAD	12 Laporan	110.399.831.00	Kab/Kota, Biro/Ses dan Kepaldesa, Rangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada BKAD	12 Laporan	110.399.831.00	
	Pemeliharaan, Pengamanan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada BKAD									

		Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Laporan Hasil Pemiksan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	1.227.404.750,00	Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Laporan Hasil Pemiksan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	1.227.404.750,00	
Kebutuhan dan Pemiksan Barang Milik Daerah (SKPD)										
		Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Laporan Hasil Pemiksan Barang Milik Daerah dan Hasil Kesesuaian Pemiksan Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	511.681.686,00	Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Laporan Hasil Pemiksan Barang Milik Daerah dan Hasil Kesesuaian Pemiksan Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	511.681.686,00	
Pengelolaan Barang Milik Daerah (SKPD)										
		Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	2.287.216.668,00	Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	2.287.216.668,00	
Pengelolaan Pemanfaatan Kebutuhan Barang Milik Daerah (SKPD)										
		Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Rekomendasi Hasil Barang Milik Daerah SKPD	30 Dokumen	558.216.372,00	Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Rekomendasi Hasil Barang Milik Daerah SKPD	30 Dokumen	558.216.372,00	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah (SKPD)										
		Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	680.000.000,00	Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	680.000.000,00	
Sekretariat Jenderal Pemerintah Daerah Kabupaten Pongos/Sekretariat Daerah			-		112.712.484,00		-		112.712.484,00	
Analisa dan Pengembangan Kebijakan Daerah, serta Pengawasan Kebijakan Kebijakan Daerah										
		Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Dokumen Hasil Analisa serta Pengembangan Kebijakan Daerah dan Kebijakan Kebijakan Daerah	1 Dokumen	110.712.484,00	Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Dokumen Hasil Analisa serta Pengembangan Kebijakan Daerah dan Kebijakan Kebijakan Daerah	1 Dokumen	110.712.484,00	
Sekretariat Jenderal Daerah Pemerintah Daerah			-		8.010.170.222,00		-		8.010.170.222,00	
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah pada SKPD										
		Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Jasa Diklat pada SKPD	1 Dokumen	70.772.000,00	Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Jasa Diklat pada SKPD	1 Dokumen	70.772.000,00	
Penyelenggaraan Kepal Pemerintah dan Kemudian (SKPD)										
		Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kepal Kesatuan dan Kemudian SKPD	12 Laporan	724.388.904,00	Kab.Wamsis, Bintara dan Kepulauan Pongos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kepal Kesatuan dan Kemudian SKPD	12 Laporan	724.388.904,00	

Pemeliharaan Kendaraan Tamu									
	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Layanan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Layanan	2.343.334.444.00	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Layanan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Layanan	2.343.334.444.00	
Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	333.193.867.00	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	333.193.867.00	
Pengadaan Bahan Logistik Kantor									
	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.147.878.687.00	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4.147.878.687.00	
Pengadaan Perabotan Rumah Tangga									
	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Jenis Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	281.297.666.00	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Jenis Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	281.297.666.00	
Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.149.455.727.00	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.149.455.727.00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada BKPG									
	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Sebutan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada BKPG	1 Dokumen	30.000.000.00	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Sebutan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada BKPG	1 Dokumen	30.000.000.00	
Rangers/Jasa Pemulung Umum/Pemeliharaan Sarana		-		**8.128.810.870.00**		-		**8.128.810.870.00**	
Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Layanan	2.276.405.000.00	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Layanan	2.276.405.000.00	
Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Layanan	5.707.644.649.00	Kab.Wakatobi, Sekretaris dan Kepaniteraan, Rangers	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Layanan	5.707.644.649.00	
Pengadaan Jasa Surat Menyurat									

		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan Pangkep	Jumlah Layanan Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	70 Layanan	342.391.200,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan Pangkep	Jumlah Layanan Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	70 Layanan	342.391.200,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		**15.283.791.000,00**		-		**15.283.791.000,00**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan Pangkep	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	4.000.000.000,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan Pangkep	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	4.000.000.000,00	
	Pengadaan Mebel									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan Pangkep	Jumlah Paket Meja yang Disediakan	10 Paket	800.000.000,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan Pangkep	Jumlah Paket Meja yang Disediakan	10 Paket	800.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan Pangkep	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	7.200.000.000,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan Pangkep	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	8.200.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan Pangkep	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	883.791.000,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan Pangkep	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	883.791.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		**5.413.555.556,01**		-		**5.413.555.556,01**	
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan Pangkep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Disediakan Pajaknya	20 Unit	1.169.537.881,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan Pangkep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Disediakan Pajaknya	20 Unit	1.169.537.881,00	
	Pemeliharaan/Perawatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan Pangkep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	3.849.370.400,00	Kab Bantaeng, Bantaeng dan Kepulauan Pangkep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	3.849.370.400,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

		Kab.Bantaeng, Bimtekda dan Kesbangpol, Keuangan	Jumlah Kendaraan dan Alsin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	1.282.828.331,00	Kab.Bantaeng, Bimtekda dan Kesbangpol, Keuangan	Jumlah Kendaraan dan Alsin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	1.282.828.331,00	
	Pengadaan Jasa Pendidikan, Biaya Pendidikan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan									
		Kab.Bantaeng, Bimtekda dan Kesbangpol, Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	182 Unit	5.158.932.680,00	Kab.Bantaeng, Bimtekda dan Kesbangpol, Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	182 Unit	5.158.932.680,00	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-		3.981.282.000,00		-		3.981.282.000,00	
	Pengadaan Gaji dan Tunjangan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Kab.Bantaeng, Bimtekda dan Kesbangpol, Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 Orang/Bulan	1.200.000.000,00	Kab.Bantaeng, Bimtekda dan Kesbangpol, Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 Orang/Bulan	1.200.000.000,00	
	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Kab.Bantaeng, Bimtekda dan Kesbangpol, Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	40.000.000,00	Kab.Bantaeng, Bimtekda dan Kesbangpol, Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	40.000.000,00	
	Pengadaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Kab.Bantaeng, Bimtekda dan Kesbangpol, Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30 Orang/Bulan	750.282.858,00	Kab.Bantaeng, Bimtekda dan Kesbangpol, Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30 Orang/Bulan	750.282.858,00	
	Penyediaan Kendaraandinas Kepala Daerah		-		10.970.977.058,00		-		10.970.977.058,00	
	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
		Kab.Bantaeng, Bimtekda dan Kesbangpol, Keuangan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	10 Paket	9.240.727.924,00	Kab.Bantaeng, Bimtekda dan Kesbangpol, Keuangan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	10 Paket	9.240.727.924,00	
	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
		Kab.Bantaeng, Bimtekda dan Kesbangpol, Keuangan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	5.718.339.082,00	Kab.Bantaeng, Bimtekda dan Kesbangpol, Keuangan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3 Paket	5.718.339.082,00	
	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									

		Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Rangkaian	Jumlah Dokumen Hasil Kelengkapan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	2,500,000,000.00	Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Rangkaian	Jumlah Dokumen Hasil Kelengkapan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	2,500,000,000.00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rangkaian		-		5,888,528,851.00		-		10,888,528,851.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Rangkaian	Jumlah Layanan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu	700 Layanan	6,008,754,031.00	Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Rangkaian	Jumlah Layanan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu	700 Layanan	6,008,754,031.00	
	Penyusunan Materi Pidato									
		Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Rangkaian	Jumlah Dokumen Materi Sambutan yang Disiapkan	12 Dokumen	174,264,391.00	Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Rangkaian	Jumlah Dokumen Materi Sambutan yang Disiapkan	12 Dokumen	174,264,391.00	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan									
		Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Rangkaian	Jumlah Layanan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Layanan	970,000,000.00	Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Rangkaian	Jumlah Layanan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Layanan	970,000,000.00	
	Fasilitasi Kepimpinan		Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kepimpinan	100 Persen	1,822,807,216.00		Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kepimpinan	100 Persen	8,822,807,216.00	
	Pengelolaan Hubungan Kepimpinan									
		Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Rangkaian	Jumlah Layanan Pengelolaan Hubungan Kepimpinan	700 Layanan	1,338,218,211.00	Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Rangkaian	Jumlah Layanan Pengelolaan Hubungan Kepimpinan	700 Layanan	1,338,218,211.00	
	Fasilitasi Kerjasama Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Rangkaian	Jumlah Layanan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Layanan	3,000,000,000.00	Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Rangkaian	Jumlah Layanan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Layanan	3,000,000,000.00	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas									
		Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Rangkaian	Jumlah Layanan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas	12 Layanan	801,176,881.00	Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi, Kecamatan, Kelurahan, Rangkaian	Jumlah Layanan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas	12 Layanan	1,201,176,881.00	
					181,371,220,883.00				185,885,370,883.00	

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun Anggaran 2025 tidak memiliki catatan usulan untuk Sekretariat Daerah pada umumnya dan Biro-biro pada khususnya baik itu dari Masyarakat maupun dari para pemangku kepentingan ataupun para stakeholder. Dengan demikian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025 tidak memuat Program ataupun Kegiatan yang berasal dari usulan-usulan tersebut.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran yang akan dicapai tentunya tidak terlepas dari layanan yang masing-masing biro berikan, adapun layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah meliputi pelayanan di bidang; pemerintahan dan kesra, hukum, perekonomian dan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, organisasi serta administrasi, keuangan dan pelayanan umum. Gambaran pelayanan dari 6 Biro yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. Kinerja pelayanan yang dilaksanakan:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait;

Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum. Jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas tugas Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan. Jenis kinerja pelayana yang dilaksanakan adalah:

a. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Biro Organisasi

Biro Organisasi sebagaimana mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana, Jenis layanan yang dilaksanakan adalah:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah:

a. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan;
b. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Optimalnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum
		Optimalnya Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan
		Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa
		Optimalnya Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah
		Optimalnya Pelayanan Pimpinan dan Administrasi Umum

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Program, kegiatan dan subkegiatan disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tujuan Pemutakhiran berdasarkan Permendagri 90/2019 yaitu Sinkronisasi kodefikasi perencanaan dan penganggaran, Mewujudkan database SIPD terpadu, Manajemen pembangunan melalui pelaksanaan kewenangan, Akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.

Subkegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan maupun subkegiatan baik bersifat kuntitatif maupun kualitatif.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengupayakan secara optimal melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2023-2026.
2. Selanjutnya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan segera menyusun RKA dan DPA Tahun 2025 dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja tersebut baik triwulan maupun semesteran.
4. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat.

5.2 Penutup

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 ini, memuat tujuan, sasaran dan evaluasi kerja tahun sebelumnya. Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Kerja bukan hanya pada perumusannya saja akan tetapi pada saat diimplementasikan oleh seluruh elemen Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaanya.

Sekretaris Daerah
Provinsi Sulawesi Barat,

Dr. MUHAMMAD IDRIS, M.Si
Pangkat : Pembina Utama
NIP. : 19640015 199303 1 001

Tabel T-C.11. Rumusan Rancana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022





































